

**GERAKAN SWAKELOLA PURNA TKI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA (STUDI KASUS GERAKAN
ORGANISASI PERTAKINA DI KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan
Minat Utama Metode Ilmu Politik**

Oleh :

**Muhammad Tantowi Jauhari
NIM. 135120501111049**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

**GERAKAN SWAKELOLA PURNA TKI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA (STUDI KASUS GERAKAN
ORGANISASI PERTAKINA DI KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

**Disusun oleh
Muhammad Tantowi Jauhari
NIM. 135120501111049**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.S.i
NIP. 196412301993031002
Tanggal:**

**Wawan Sobari, S.IP.,MA.,Ph.D
NIP. 19740801 200801 1 009
Tanggal:**



**GERAKAN SWAKELOLA PURNA TKI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA (STUDI KASUS GERAKAN
ORGANISASI PERTAKINA DI KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

**Disusun oleh
Muhammad Tantowi Jauhari
NIM. 135120501111049**

**Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada tanggal 04 Agustus 2017**

Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.S.i

NIP. 196412301993031002

Tanggal:

Wawan Sobari, S.IP.,MA.,Ph.D

NIP. 19740801 200801 1 009

Tanggal:

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Wimmy Halim, S.IP., M.Sos

NIK. 201607 900704 1 001

Faza Dhora Nailufar., S.IP.,M.IP

NIK. 2012088601302001

Malang,04 Agustus 2017

Dekan FISIP UB

Prof. Dr. Unti Ludigdo., SE.,M.Si.,Ak

NIP. 196908141994021001

**GERAKAN SWAKELOLA PURNA TKI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA (STUDI KASUS GERAKAN
ORGANISASI PERTAKINA DI KABUPATEN BLITAR)**

ABSTRAK

Penelitian gerakan sosial ini mengangkat tentang pola gerakan swakelola yang dilakukan oleh organisasi Pertakina Kabupaten Blitar. Gerakan sosial pada hakikatnya merupakan suatu fenomena realitas sosial yang melakukan tindakan secara kolektif. Artinya gerakan sosial dihasilkan dari permasalahan sosial ditengah masyarakat dan menciptakan sebuah perlawanan untuk merubah kondisi sosial. Organisasi Pertakina sebagai gerakan dalam masyarakat mencoba menempatkan diri ditengah situasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh purna TKI di Kabupaten Blitar. Usaha yang dilakukan organisasi Pertakina dilakukan dengan menciptakan pelayanan bantuan serta penciptaan aktivitas pemberdayaan kepada anggota dan purna TKI. Secara teknis, kecenderungan yang muncul kemudiannya adalah adanya kekuatan gerakan sosial yang menempatkan organisasi Pertakina mampu menjadi kekuatan penggerak purna TKI di Kabupaten Blitar dan menjadi alasan pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran untuk mengadopsi pola gerakan organisasi Pertakina sebagai jalan menuntaskan permasalahan yang dialami oleh purna TKI. Strategi dan mempertahankan isu-isu i menjadi patokan utama bagi Pertakina dalam mempertahankan keberlangsungan gerakan sosial swakelola. Kedepan dengan strategi dan mempertahankan isu-isu tersebut dapat mendorong dan memperkuat gerakan Pertakina agar mengalami posisi daya tahan dalam menghadapi turun naiknya isu dalam masyarakat.

Kata Kunci: Gerakan sosial, Organisasi Pertakina, TKI.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

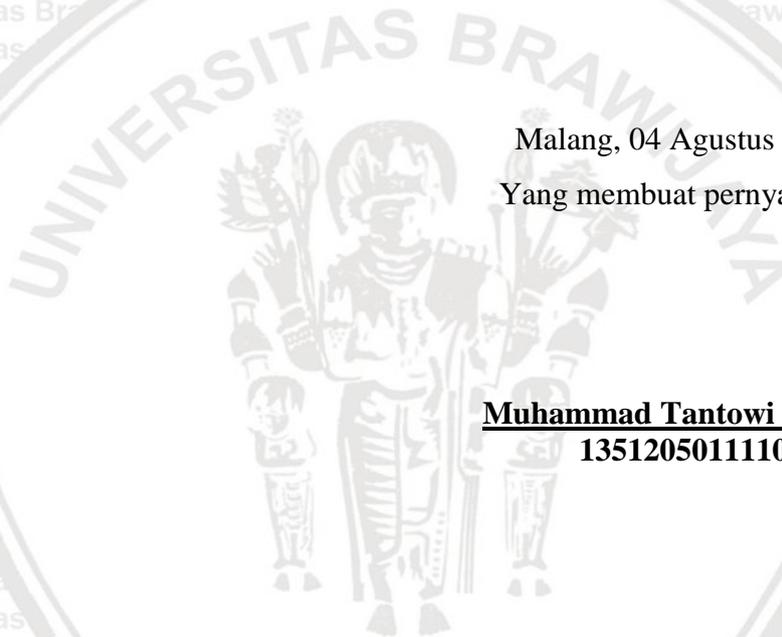
Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Malang, 04 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Tantowi Jauhari

135120501111049



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Objektif	8
1.3.2 Tujuan Subjektif	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Dasar Teoritis	14
2.1.1 Gerakan Sosial	14
2.2 Kerangka Konseptual	19
2.2.1 Pemberdayaan	19
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	23
2.2.3 Civil society	25
2.3 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	34
3.4 Teknik Penentuan Informan	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	41
3.7 Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM	44
4.1 Organisasi Pertakina	44
BAB V PEMBAHASAN	52
5.1 Gerakan swakelola organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar	52
5.1.1 Peran Aktor Organisasi Pertakina dalam Memperluas Pengaruh Jaringan	68
5.1.2 Proses Penciptaan Aktivitas Organisasi Pertakina dalam Memajukan Kesejahteraan Anggota	73



5.2 Organisasi Pertakina dijadikan model gerakan pemberdayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar	80
5.2.1 Pembangunan Kampung Pertakina sebagai investasi keberlangsungan gerakan sosial	86
5.3 Hambatan dan Penunjang Gerakan Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar	88
5.3.1 Hambatan	90
5.3.2 Penunjang	92
BAB VI PENUTUP	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	96
Daftar Pustaka	98



Daftar Tabel

Tabel 1.1 Grafik PDRB Kabupaten Blitar.....	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Kapasitas Penentuan Informan.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja TKI dari Kabupaten Blitar.....	46
Tabel 4.2 Susunan Pengurus Organisasi Pertakina	47
Tabel 4.3 Kordinator Lapangan Organisasi Pertakina.....	48
Tabel 5.1 Daftar Anggota Organisasi Pertakina	53



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Siklus Gerakan Sosial	17
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 4.1 Logo Organisasi Pertakina.....	45
Gambar 5.2 Organisasi Pertakina.....	68
Gambar 5.3 Kerja sama organisasi Pertakina dengan media.....	69



Daftar Singkatan

- Pertakina : Persatuan purna tenaga kerja dan keluarga
- TKI : Tenaga kerja indonesia
- Disperindag : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinsos : Dinas Sosial
- Disnaker : Dinas Ketenagakerjaan
- UMKM : Usaha mikro kecil menengah
- IKM : Industri Kecil Menengah



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

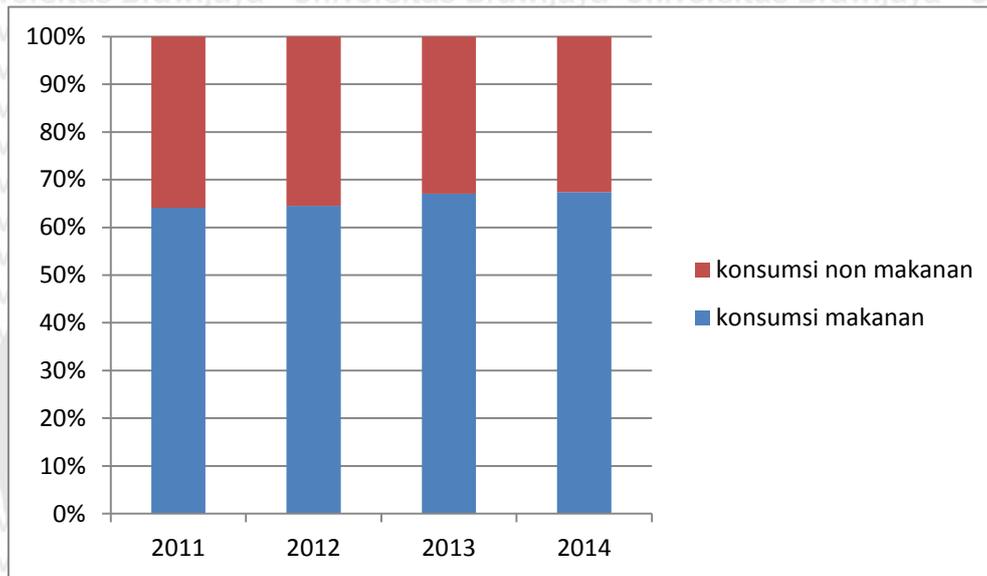
Kabupaten Blitar yang terletak di selatan Gunung Kelud memiliki kekayaan kesuburan tanah yang sangat tinggi. Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah potensi lumbung pangan yang berada di Jawa Timur ternyata tidak sebaik dengan kondisi perekonomian masyarakatnya. Kondisi lahan yang subur menjadikan mayoritas penduduk masyarakat Kabupaten Blitar bekerja di bidang pertanian serta peternakan yang menjadi sektor penghasil utama perekonomian masyarakat dengan tingkat nilai PDRB Kabupaten Blitar yang mencapai 47%.¹

Potensi besar tersebut tidak serta merta menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Permasalahan tersebut terjadi karena minimnya SDM, sehingga masyarakat belum dapat mengolah hasil pekerjaan mereka untuk dijadikan barang yang bernilai jual tinggi dan mengakibatkan terjadinya ketidak seimbangan antara pemasukan dan kebutuhan pengeluaran yang semakin hari meningkat cukup signifikan, hal ini ditandai dengan harga kebutuhan pokok dan penunjang kehidupan yang meningkat secara drastis.

¹ Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Potensi Daerah Pertanian .

Peningkatan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Blitar tersebut mengakibatkan semakin naiknya keperluan pengeluaran konsumsi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:²

Tabel Grafik 1.1
PDRB Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Blitar



Sumber: BPS Kabupaten Blitar 2017

Dengan adanya permasalahan tersebut tidak jarang masyarakat Kabupaten Blitar menjadi putus asa untuk mencari pendapatan perekonomian di daerah sendiri. Keputusan tersebut terjadi karena didasari oleh sedikitnya lapangan pekerjaan dan upah penghasilan yang masih dibawah standar. Persoalan tersebut memaksa sebagian dari masyarakat Kabupaten Blitar mengadu nasib ke luar negeri untuk

² PDRB Pengeluaran Rumah Tangga Kabupaten Blitar di akses dari https://blitarkab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Produk-Domestik-Regional-Bruto-Kabupaten-Blitar-Menurut-Pengeluaran-2010---2014---.pdf Pada 23 April 2017 Pukul 14.30 wib

mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi agar mencukupi kebutuhan yang semakin meningkat. Setiap tahunnya pengiriman TKI ke luar negeri yang berasal dari Kabupaten Blitar mengalami peningkatan.

Peningkatannya berkisar 3 persen. Untuk 2015, TKI asal Kabupaten Blitar mencapai 2.936 tenaga. Hingga November 2016 atau selama 11 bulan, jumlahnya mencapai 3.275. ada peningkatan sebanyak 339 tenaga," jelasnya. Artinya, dalam sebulan, rata-rata kiriman tenaga kerja ke luar negeri berkisar 297 orang.³

Banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri, menjadikan Kabupaten Blitar sebagai salah satu penyumbang terbesar pekerja TKI ke luar negeri di Provinsi Jawa Timur setelah Malang 8.114, Blitar 7.973.⁴

Dengan jumlah TKI yang tinggi juga menimbulkan dampak sosial yang cukup mengkuatirkan bagi kehidupan para TKI meliputi permasalahan ketergantungan menjadi pekerja di luar negeri serta permasalahan yang menyangkut kondisi sosial keluarga TKI tersebut.

Permasalahan sosial tersebut antara lain terjadinya kasus perceraian yang di alami oleh para TKI yang diakibatkan oleh jarak dan masalah tertentu yang mengganggu hubungan tersebut. Kemudian terjadilah permasalahan lain seperti kenakalan remaja yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian orangtua yang kemudian anak TKI tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan sosial di

³ Sebulan, Blitar Kirim 297 TKI ke Luar Negeri, Diakses dari <http://www.jpnn.com/news/sebulan-blitar-kirim-297-tki-ke-luar-negeri> . Pada tanggal 17 maret 2017. pukul 09.30 Wib.

⁴ Jumlah Terbesar Kabupaten Penyumbang TKI di Indonesia. Diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang> Pada 27 April 2017 Pukul 09.00 Wib.

masyarakat. Selain hal tersebut, permasalahan yang sering dijumpai oleh TKI terkait kasus penipuan juga tinggi, sehingga tidak jarang dari TKI tersebut frustrasi dan mengalami gangguan jiwa karena uang yang lama dikumpulkan hilang diakibatkan penipuan.

Permasalahan yang dialami oleh para purna TKI tersebut menjadi tonggak awal gerakan swakelola Pertakina Kabupaten Blitar yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi. Gerakan tersebut hadir pada kurun waktu tahun 2010 untuk merealisasikan solusi dari banyaknya kasus yang di alami TKI dan mendorong TKI untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mandiri.⁵

Tujuan yang ingin dicapai oleh gerakan swakelola Pertakina ini adalah merubah prespektif pemikiran para purna TKI untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang diwujudkan ke dalam bentuk usaha ekonomi. Usaha ekonomi tersebut seperti mengolah potensi lokal seperti usaha makanan dan minuman serta kerajinan dan usaha lain yang dapat dikembangkan dalam usaha industri kecil menengah. Anggota organisasi Pertakina tersebut memanfaatkan remitansi⁶ sebagai modal dalam melakukan gerakan ini. Penggunaan dana remitan ini ditujukan untuk menginvestasikan ke bentuk usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, karena memang disadari kebanyakan dari kasus TKI yang berangkat lagi ke

⁵ hasil wawancara singkat dengan salah satu pengurus organisasi pertakina pada tanggal 10 maret 2017.

⁶ remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. atau dana upah yang dihasilkan selama bekerja di luar negeri dan masuk ke negara asal pekerja tersebut.

luar negeri adalah kurangnya pengetahuan untuk menggunakan dana remitan.

Penggerakkan perubahan prespektif para purna TKI ini juga tidak mudah. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan yang mengakibatkan minimnya antusias para purna TKI masuk dalam gerakan swakelola untuk melakukan usaha kreatif yang dapat diinvestasikan dalam waktu jangka panjang. Pembangunan lingkungan sosial juga turut menumbang keberhasilan yang besar dalam proses gerakan swakelola Pertakina.

Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya gerakan swakelola organisasi Pertakina.⁷ Lingkungan sosial menjadi tonggak keberhasilan karena adanya kondisi yang memacu perilaku gerakan sosial pada diri individu atau kelompok yang merasa dalam permasalahan dan nasib yang sama. Ferdinand Tonnies berpendapat bahwa pada dasarnya di satu pihak adalah faktor perasaan, simpati pribadi, dan kepentingan bersama.⁸ Gerakan ini dibuat bertujuan untuk melakukan perubahan dan mencari solusi atas permasalahan anggota gerakan swakelola purna TKI yang berada di Kabupaten Blitar.

Gerakan swakelola yang merupakan bagian dari gerakan sosial, tidak terlepas dari aktor-aktor yang membingkai dan memobilisasi para purna TKI yang mendorong untuk ikut dalam gerakan swakelola tersebut.

⁷ Wawancara bersama anggota organisasi purna TKI kabupaten Blitar 2017.

⁸ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Hlm, 35.

Organisator tersebut berperan dalam membuat isu-isu dan memobilisasi para calon pendukung dengan memberikan makna kepada mereka.⁹ Proses tersebut menjadi salah satu penentu untuk mendapatkan kekuatan gerakan sosial tersebut dalam mencapai tujuan.

Organisasi Pertakina ini merupakan solusi bagi para purna TKI yang berada di Kabupaten Blitar dan sekaligus menjadi hal yang baru sebagai pembeda dalam membantu berbagai persoalan sosial yang dialami oleh para purna TKI. Organisasi Pertakina memfokuskan gerakannya dalam pemberdayaan di bidang usaha IKM. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan serta visi misi pemerintahan Kabupaten Blitar yaitu Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.¹⁰ Dengan adanya kebijakan dari pemerintahan daerah Kabupaten Blitar sekarang menjadikan pergerakan organisasi ini memiliki kemudahan akses di setiap lini dalam meraih tujuannya.

Produk-produk dari organisasi Pertakina ini juga menjadi salah satu produk unggulan dari Kabupaten Blitar. Karena dalam setiap pameran yang

⁹ Irawati (2012) *"jurnal studi pemerintahan: identitas kultural dan gerakan politik kerapatan adat kurai dalam representasi politik lokal,"* Volume 3 nomer 1: 65-92.

¹⁰ visi Misi Kabupaten Blitar. Diakses dari www.blitarkab.go.id . pada hari Kamis 6 April 2017. Pukul 14.20 Wib.

diselenggarakan oleh Pemkab Blitar di dalam maupun di luar mayoritas menggunakan dari produk organisasi Pertakina. Pertakina saat ini juga menjadi salah satu bagian yang diperhatikan oleh Pemda Kabupaten Blitar dan mendorong pemerintah meluncurkan slogan “*Ayo Bela dan Beli Produk-Produk Blitar*” sebagai hasil dari kuatnya pergerakan ekonomi kreatif yang dilakukan organisasi Pertakina. Pada saat ini organisasi Pertakina setidaknya memiliki 365 anggota. Sejumlah 85 diantara sudah bisa berusaha sendiri dengan skala gaji antara Rp 4 – Rp 7 juta per bulan.¹¹

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Gerakan swakeloa organisasi Pertakina tersebut dengan mengambil judul “**Gerakan Swakelola Purna TKI dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Gerakan Organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar)**”

Gerakan swakelola organisasi Pertakina ini menjadi salah satu titik fokus dalam penelitian ini. Alasan gerakan swakelola organisasi Pertakina ini dipilih penulis karena memiliki keunikan sebagai jawaban atas banyaknya permasalahan TKI di Indonesia. Karena perlu diketahui, tidak semua daerah yang menjadi basis TKI memiliki pergerakan sosial seperti yang dilakukan oleh organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar. Penulis tertarik melakukan penelitian didasari dengan semakin meningkatnya

¹¹Pertakina Kabupaten Blitar diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id> pada tanggal 7 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

pengaruh dampak positif dan perkembangan gerakan yang sangat dinamis saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar penelitian tetap terfokus dan terarah serta tidak menimbulkan penyimpangan dari pokok permasalahan. sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola gerakan organisasi PERTAKINA dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan cara mencapai tujuan?
2. Mengapa gerakan organisasi Pertakina berhasil mendorong pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengadopsi pola gerakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya gerakan swakelola organisasi PERTAKINA.

2. Untuk mengetahui pola gerakan purna TKI dalam membangun gerakan swakelola untuk memperbaiki permasalahan yang sedang dihadapi para purna TKI.

1.3.2 Tujuan Subjektif

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang solusi permasalahan sosial TKI melalui jalur Gerakan Swakelola.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia pendidikan dan bisa menjadi contoh pada penelitian selanjutnya.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan baik pendidikan, hukum maupun politik mengenai solusi atas permasalahan sosial anggota organisasi PERTAKINA melalui gerakan swakelola.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini maka penulis menambah ilmu secara nyata di lapangan dan penulis menyamakan teori yang pernah diajarkan dalam mata kuliah bersangkutan.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi dan pengetahuan sebagaimana peran massa sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pengambilan keputusan.

Seperti halnya gerakan swakelola organisasi purna TKI di Kabupaten Blitar dalam mensejahterakan anggotanya.

3. Bagi masyarakat

Sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan inspirasi dalam mengentaskan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan melalui cara seperti yang diteliti penulis.

1.5 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelahan penelitian yang lebih konkret, penulis melakukan peninjauan lebih awal terhadap penelitian terdahulu yang pernah ada. Penelitian terdahulu ini mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti oleh penulis agar berguna untuk mendukung penelitian yang akan penulis lakukan serta mengetahui keabsahan hasil penelitian penulis sendiri.

Hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Tita Merisa Rahmawati. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang	Faktor Yang Mempengaruhi Minat Tenaga Kerja Untuk Bekerja Ke Luar Negeri (Kasus: Kota Semarang)	Banyaknya jumlah tenaga kerja di Kota Semarang yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam negeri khususnya yang berada di Kota Semarang, yang mengakibatkan pengangguran terbuka meningkat tiap tahun	Membahas tentang pemberian solusi terhadap permasalahan TKI
Disertasi I Dewa Rai Astawa, SH Magister Hukum Universitas Diponegoro	Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap TKI diluar negeri yang dikirim PJTKI dan non PJTKI	Membahas tentang pemberian solusi terhadap permasalahan TKI
Skripsi Faridah Nur Jannah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Luar Negeri Korban <i>Exploitation Rape</i>	Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri yang mejadi korban	Membahas tentang pemberian solusi terhadap permasalahan TKI

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
		<i>exploitation</i> <i>rape</i>	
Citra Berlian Butsi, Dkk. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 7, Hal. 1313-1322	Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tki (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)	Efektivitas program asuransi TKI sebagai bentuk perlindungan UPT P3TKI Surabaya dalam upaya pemenuhan hak-hak TKI	Membahas tentang Pemberian solusi terhadap permasalahan TKI
Jurnal dari Adharinalti Volume 1 nomor 1, april 2012	Perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia irregular di luar negeri	Bantuan perlindungan TKI yang berada di luar negeri yang tidak sah	Membahas tentang Pemberian solusi terhadap permasalahan TKI

Sumber: Diolah oleh peneliti pada tanggal 17 maret 2017

Penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu dengan relevansi yang sama terhadap topik yang akan diteliti. Pertama, penulis membandingkan dengan penelitian dari Tita Merisa Rahmawati dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul faktor yang mempengaruhi minat tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri (kasus: Kota Semarang. Penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian yang terletak pada banyaknya jumlah tenaga kerja di Kota Semarang yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia dalam negeri, khususnya di Kota Semarang yang mengakibatkan pengangguran terbuka

meningkat setiap tahun. Persamaan dari penelitian penulis ini adalah sama-sama membahas tentang pemberian solusi terhadap permasalahan TKI.

Penulis juga membandingkan hasil disertasi dari Dewa Rai Astawa, SH dari Magister Hukum Universitas Diponegoro. Judul dari penelitian terdahulu adalah aspek perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang memiliki fokus perbedaan penelitian pada aspek upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri yang dikirim PJTKI dan non PJTKI. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada pemberian solusi terhadap permasalahan TKI.

Penulis juga membandingkan dengan penelitian dari Faridah Nur Jannah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pemfokusan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang terletak pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita indonesia di luar negeri yang menjadi korban *Exploitation Rape*, selain itu penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu dari jurnal Citra Berlian Butsi, Dkk yang memiliki perbedaan pada efektivitas program asuransi TKI sebagai bentuk perlindungan UPT P3TKI Surabaya dalam upaya pemenuhan hak-hak TKI. Persamaan dari tujuan penelitian terdahulu sama dengan tujuan penelitian penulis tentang pemberian solusi permasalahan TKI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Dasar Teori

1.1.1 Teori Gerakan Sosial

Sebelum dan setelah berdirinya negara Indonesia, masyarakat Indonesia tentunya tidak asing lagi dengan gerakan sosial yang mencirikan perjuangan atas ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi dalam kondisi sosial masyarakat. Gerakan sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian sosial yang dialami masyarakat yang menciptakan deprivasi. Deprivasi¹ sosial ini menciptakan perasaan terancam kehilangan kedudukan sosial ekonominya, kehilangan hak-hak politiknya atau kehilangan warisan kulturalnya.²

Gerakan sosial sendiri menurut Mc Adam ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya sebuah gerakan sosial, yakni mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), peluang politik (*political opportunities*) dan proses pbingkaiian (*framing process*).³ Pendekatan mobilisasi sumber daya ini sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah gerakan sosial, dimana mobilisasi sumber daya ini menurut Mc Charty adalah sejumlah cara kelompok gerakan melebur dalam dalam aksi kolektif,

¹ Deprivasi sosial merupakan suatu keadaan tidak diperolehnya kebutuhan-kebutuhansosial oleh individu, sehingga merasa tersisih dari masyarakatnya. manusia merupakan makhluk sosial dan ia memiliki berbagai macam kebutuhan sosial. faktor yang mempengaruhi deprivasi sosial dapat berasal dari geografis, keadaan lingkungan, fisik dan sosial ekonomi yang membuat individu menjadi terisolasi

² R Z Leirissa (2004) "*Jurnal Sejarah: Charless Tilly dan Studi Tentang Revolusi*," Volume 6 nomer 1: 41.

³ Loc.cit

termasuk di dalamnya menciptakan taktik gerakan dan bentuk sebuah gerakan.

Pendekatan peluang politik yang tidak memfokuskan sekedar dalam kehidupan internal organisasi gerakan saja, tetapi perhatiannya sudah sistematis pada lingkungan politik dan institusi. Peluang politik sangat menentukan kapan sebuah gerakan sosial dapat memiliki kesempatan kemajuan-kemajuan dalam gerakannya. Peluang tersebut didapat ketika para aktor-aktor gerakan dapat memiliki akses dalam lembaga politik dan memperkuat posisi gerakan sosial karena ada akses serta peluang pemanfaatan sumber daya eksternal untuk mewujudkan tujuan aktor-aktor gerakan. Lembaga politik tersebut seperti pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai berikut:⁴

1. Regulasi pembuatan kebijakan publik,
2. Pengendalian dan pengawasan publik,
3. Pelindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta.
4. Fasilitasi kepentingan negara dan publik
5. dan pelayanan kepentingan publik.

Dengan fungsi pemerintahan seperti di atas, maka gerakan sosial dapat mempengaruhi atau mendesak pemerintah agar dapat berpihak kepada mereka. Salah satu perwujudan dari gerakan sosial adalah terciptanya

⁴ A. Rosidi dan A Fajriani, *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Public*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013) Hlm, 7.

tujuan-tujuan keperpihakan elemen politik untuk dapat membantu dalam keberhasilan gerakan. Ketiga, pendekatan proses pembingkaihan merupakan proses dimana para aktor-aktor gerakan memfokuskan bagaimana caranya menguasai ide-ide dan memobilisasi gerakan dengan membesarkan sebuah isu agar menarik para calon pendukung dengan pemberian makna perjuangan bagi mereka. Proses pembingkaihan dilakukan untuk:⁵

1. Memperkuat kesadaran kolektif, keputusan-keputusan strategis sebagai bagian dari gerakan.
2. Mempertegas dan memperkuat subjek kontestasi antara aktor gerakan selaku representasi gerakan dengan negara para kelompok-kelompok yang berlawanan.

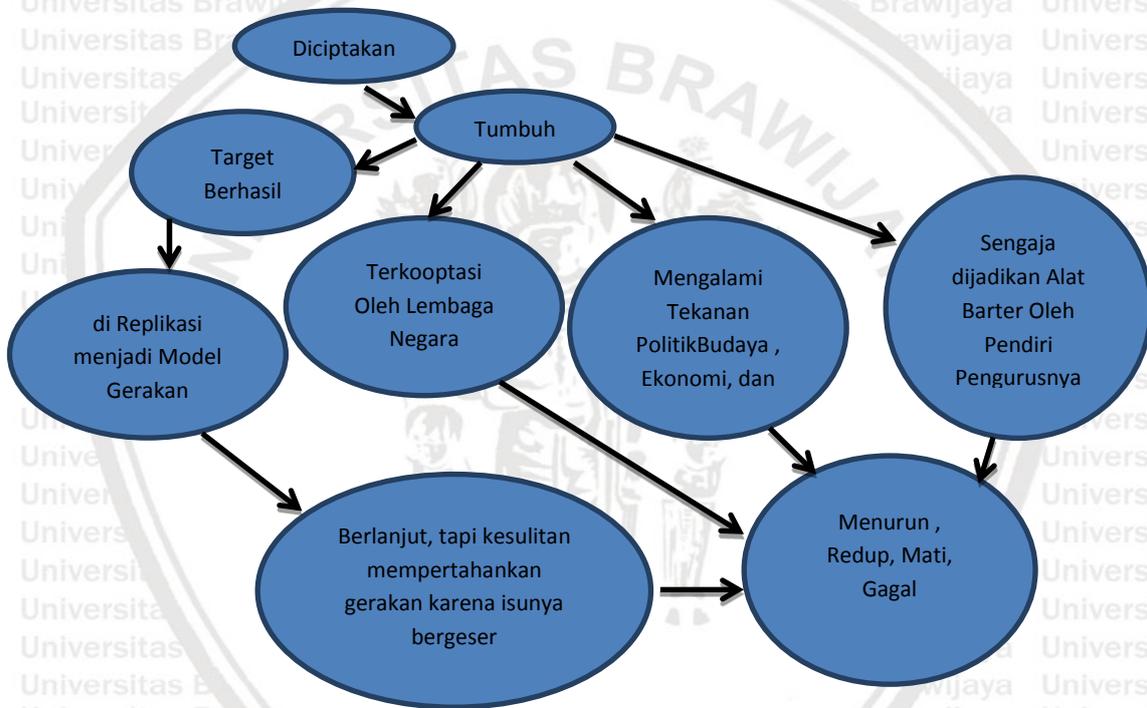
Terciptanya sebuah gerakan tidak serta merta dengan mengajak kelompok masyarakat untuk bergerak. Terciptanya sebuah gerakan diperlukan pengelaborasi masalah yang dihadapi oleh kelompok atau anggota. Karena dalam sebuah pengorganisasian gerakan sosial harus adanya alat pemersatu atau pengelaborasi permasalahan yang sama agar seluruh anggota atau kelompok dapat mengetahui serta memahami awal mula persoalan gerakan, struktur gerakan dampak masalah maupun strategi meraih tujuan.

Menurut Paulo Freire, metode pengorganisasian yang dapat dilakukan agar dapat menginspirasi upaya penciptaan atau memunculkan

⁵ Loc.cit

gerakan sosial, yaitu dengan penciptaan atau memunculkan lingkaran penyadaran, mengadakan pendidikan penyadaran, aksi-aksi kultural, dan pendidikan hak-hak bernegara.⁶ Dan adapun cara menerapkan metode tersebut adalah dengan belajar dari persoalan masa lalu dalam studi kasus yang sama. Di Indonesia, Siklus gerakan sosial dalam skala nasional maupun skala kecil di daerah dapat dilihat seperti bagan di bawah ini.⁷

Gambar Bagan 2.1 Siklus Gerakan Sosial



Sumber: Diadaptasi dari Blumer Mauus dan Tilly serta disesuaikan dengan kondisi di Indonesia

⁶ Kurniawan lutfhi J Dkk. *Negara , Civil Society dan Demokratisasi*.(Jakarta .Intrans Publishing, 2012) hlm 90.

⁷ *Ibid*, hlm 92

Setelah gerakan sosial muncul, perlu adanya upaya pembangunan lingkungan sosial untuk merangsang individu dan kelompok untuk mempertahankan isu yang sedang dijalankan. Pembangunan lingkungan sosial tersebut bertujuan untuk memacu dan meraih target dan ketika tujuan tersebut tercapai gerakan tersebut diduplikasikan sebagai model bagi gerakan lainnya. Akan tetapi, tidak sedikit sebuah gerakan kesulitan dalam mempertahankan eksistensinya dan berakibat pada kegagalan sebuah gerakan bahkan mati. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa sebab seperti yang dipaparkan dalam bagan diatas,yaitu pada fase terkooptasinya sebuah gerakan oleh lembaga negara maupun pelaku ekonomi. kemudian pada fase selanjutnya ketika gerakan tersebut tumbuh bisa mati karena terjadi tekanan elemen politik, budaya, ekonomi maupun produk hukum karena dianggap tidak sesuai dengan norma yang terkandung dari 4 elemen tersebut.

Yang terakhir adalah varian dimana gerakan sosial memang dibuat dan digunakan sebagai alat barter oleh para pendirinya demi kepentingan yang bersifat pragmatisme. Gerakan tersebut dikembangkan sampai di titik krusial sebuah gerakan dan ditukar gulingkan dengan kepentingan para penguasa atau pejabat struktur negara. Dengan hal itu, sudah hampir di pastikan gerakan sosial tersebut akan mati.

Berbeda lagi dengan gerakan sosial menurut Laode Ida, gerakan sosial adalah gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk melakukan

perubahan melalui organisasi sebagai wadah gerakan, gerakan tersebut melembaga, memiliki gagasan alternatif perubahan, aktivitas dan gerakannya terus-menerus, memiliki identitas kolektif, serta kehadirannya menjadi tantangan bagi pihak lain.⁸ Kemudian menurut Laode Ida gerakan sosial memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu:⁹

1. Ada upaya kolektif melakukan perubahan
2. Adanya organisasi sebagai wadah gerakan
3. Gerakan tersebut melembaga
4. Memiliki gagasan alternatif perubahan
5. Aktivitas dan gerakannya terus-menerus
6. Memiliki identitas kolektif sebagai ciri
7. Gerakan dilakukan sekelompok orang
8. Memiliki identitas kolektif dan alternatif perubahan
9. dapat berbentuk kelompok pelajar/mhs, lsm, ormas, pers, pressure group, partai politik, dll
10. Bertahan cukup lama.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pemberdayaan

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh

⁸ Said D.A. *Fenomena Partai Keadilan*. (Noura. Jakarta. 2002) hlm 52

⁹ *ibid.*

suatu rasa identitas bersama.¹⁰ Dimana hal tersebut menjadikan masyarakat hidup saling memberikan pengetahuan untuk memperoleh tujuan kesejahteraan. Dalam konsep sosial di masyarakat, dalam pembangunan kelompok ataupun komunitas pasti ada konsep pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.¹¹ Pemberdayaan merupakan nilai inti dari pekerjaan sosial profesi dan sosial pekerja yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan klien dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya sehingga mereka bisa mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹²

Konsep pemberdayaan menurut Friedman, dalam hal pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.¹³ Pemberdayaan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam membangun komunitas di masyarakat. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan

¹⁰ Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Djambangan. Jakarta. Longman. 2009) hlm 40

¹¹ Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka 2003

¹² (Huff & Johnson), dalam Rebecca Morrison V. V (2006). *The Impact Of Msw Education On Social Worker Empowerment And Commitment To Client Empowerment Through Social Justice Advocacy*. Volume.42, no.1. Jstore hlm. 105

¹³ Friedman, John. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. (Blackwell Publishers, Cambridge, USA, 1992)

belunggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat yang di dalam sebuah struktur dinamika kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok komunitas lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya keterbatasan kemampuan.

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *rule of the game* tertentu.
3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.

¹⁴Pemberdayaan masyarakat. diakases dari [suniscome.50webs.com /data/ download/005%20Konsepsi% 20Pemberdayaan.pdf](http://suniscome.50webs.com/data/download/005%20Konsepsi%20Pemberdayaan.pdf). di unduh hari rabu pukul 18.20 WIB 2017

4. Post-strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Pemberdayaan ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Dimana kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai di dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam pemberdayaan ada 4 target yang harus dijadikan sebuah patokan. Pertama, akses, yang berarti target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri. Kedua, partisipasi, yang berarti target yang diberdayakan pada akhirnya dapat berpartisipasi mendayagunakan risorsis yang diaksesnya. Ketiga, kontrol, dalam artian target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan risorsis tersebut. Keempat, kesetaraan, dalam arti pada tingkat tertentu saat

terjadi konflik, target mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah.¹⁵ Target tersebut sangat penting sekali untuk dapat merealisasikan pemberdayaan untuk mencapai keberhasilan.

Adapun sasaran yang dituju oleh pemerintah dalam mensukseskan pemberdayaan masyarakat adalah seperti mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat perdesaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga formal dan informal.¹⁶ Dengan adanya pengoptimalan dan kerja sama antara lembaga formal dan informal dapat mempercepat proses pemberdayaan yang bermanfaat dan mempercepat keberhasilan mengangkat perekonomian masyarakat.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan

¹⁵ Randy R dan Rian Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. (Penerbit: PT Elex Media Koputindo, 2007) hlm. 10

¹⁶ Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan lihat di <http://bpm.malangkab.go.id/>. Pada rabu 25 januari 2016 pukul 17.20 Wib.

kebutuhan keluarga dan masyarakat.¹⁷ Posisi dari lembaga pelayanan sosial disini memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memang sangat perlu sekali adanya pelayanan seperti pembinaan dan fasilitasi yang diperlukan untuk memberikan nilai lebih dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.¹⁸

Kesejahteraan sendiri merupakan rasa tentram masyarakat karena terpenuhinya hajat hidup lahir batin.¹⁹ Kesejahteraan berasal dari

¹⁷ Kesejahteraan Sosial lihat di <http://www.gurupendidikan.com/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/> g= diakses pada tanggal 26 januari 2017 pukul 15.30 wib.

¹⁸ Undang- undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

¹⁹ Maeswara Garda (2009). Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono. (Narasi: Yogyakarta). Hlm 246

terpenuhinya standart universal yang menyangkut kesehatan, sandang, papan ataupun dalam artian kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dilain sisi yang sangat penting dari kesejahteraan adalah kondisi batin yang baik, Dimana Kesejahteraan batin meliputi persepsi yang menyangkut intelektual, emosional maupun spiritual rakyat. kesejahteraan merupakan bukan alat perjuangan akan tetapi tujuan perjuangan.²⁰

2.2.3 Civil Society (Masyarakat Madani)

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dengan keberadaan *civil society*. Masyarakat madani ini hadir karena adanya perkembangan kondisi masyarakat tentang arti kebebasan dalam menggapai hak individu yang tidak boleh terikat secara mutlak oleh pemerintah. Dimana dalam masyarakat yang demokratis pasti ada suatu kekuatan aktif dari *civil society* untuk membatasi kekuasaan negara. Dari sinilah gagasan-gagasan tersebut muncul, hal tersebut terjadi karena adanya kondisi negara yang tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Masyarakat madani sendiri berasal dari bahasa inggris, *civil society*.

Kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa latin yaitu *civitas dei* yang berarti kota illahi dan *society* yang berarti peradaban.²¹ Dimana kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yang memiliki peradaban yang maju.

²⁰ Ibid, Hlm 246

²¹ *ibid*

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara tidak boleh mutlak, akan tetapi ada batasan-batasannya. Batasan-batasan ini adalah hak asasi yang dasar atau basic human rights, yang menurut Locke terdiri dari hak kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan.²² Kemudian menurut Ferguson menitikberatkan pada aspek keadaan dan keberadaban masyarakat. Masyarakat yang kuat mampu mengimbangi peran negara agar tidak didominasi oleh negara (negara tidak menghegemoni warga).²³

2.3 Kerangka Berfikir

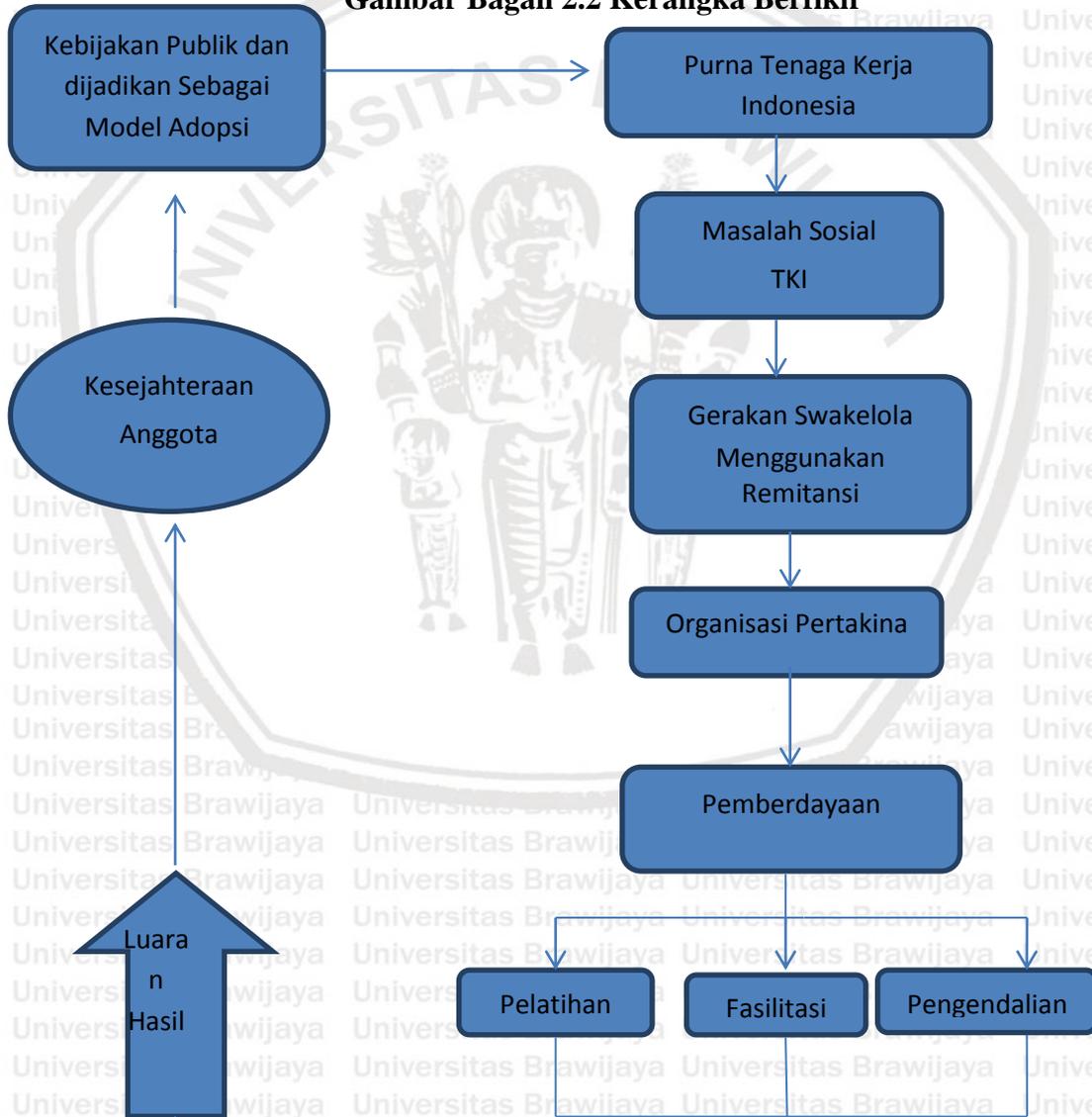
Dalam pelaksanaan penelitian tentang fenomena *Gerakan swakelola purna TKI* yang terdapat pada organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar, maka dibuat suatu kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penelitian. Tujuan dari kerangka berpikir ini adalah untuk menjaga fokus penelitian agar tetap sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan.

²² Budiman A. *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. (Pustaka Alfa Beta. Jakarta. 2006) hlm 52

²³ Kurniawan J.L. dkk. *Negara Civil Society dan Demokratisasi*. (Intrans Publishing, Malang. 2008) hlm 25



Gambar Bagan 2.2 Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Oleh Penulis Pada Tanggal 17 maret 2017

Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa gerakan swakelola purna TKI dari organisasi Pertakina muncul dari adanya permasalahan sosial yang ditanggung oleh para purna TKI. Permasalahan sosial tersebut menyangkut kesejahteraan sosial TKI yang meliputi kesejahteraan ekonomi sosial serta batin yang mendorong hadirnya fenomena gerakan tersebut. Karena banyak sekali permasalahan sosial seperti tidak jarang disisi sosial banyak TKI yang mengalami frustrasi dengan permasalahan keadaan keluarga TKI seperti kasus terjadinya perceraian hingga penelantaran anak oleh orangtua yang bekerja menjadi TKI.

Berawal dari permasalahan tersebut, muncul fenomena gerakan yang di pimpin oleh ibu sulistianingsih dkk untuk mencari inisiatif solusi untuk membantu permasalahan para purna TKI. Fenomena gerakan tersebut hadir dalam bentuk yang bersifat kekeluargaan dengan mengutamakan rasa gotong royong melalui pemberdayaan dalam memberikan keahlian bagi para purna TKI yang diharapkan ilmu tersebut dapat menjadi alat untuk mengubah perspektif pemikiran mereka dalam mencari mata pencaharian yang semula menjadi tenaga kerja di negeri lain beralih ke ranah bidang usaha.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi Pertakina ini adalah dengan pemberian pelatihan, fasilitas dan pengendalian untuk mensukseskan kegiatan usaha yang dilakukan oleh purna TKI tersebut.

Pemberian pelatihan ini dengan cara pemberian pendidikan mengenai bagaimana caranya untuk melakukan bidang usaha yang ditekuni, kemudian fasilitasi yang dilakukan oleh organisasi Pertakina adalah dengan cara pembantuan perizinan tentang produk usaha para purna TKI yang bergabung dalam organisasi tersebut. Terakhir adalah pengendalian yang ditujukan agar dapat melewati masa resistensi dalam dunia usaha. Karena tidak dapat dipungkiri, dalam tahap ini banyak sekali yang gugur dalam kegiatan usaha. Dengan berhasilnya para purna TKI ini dalam bidang usaha IKM diharapkan memperbaiki kesejahteraan sosial kehidupan TKI dan sekaligus menjadi solusi permasalahan sosial purna TKI.

Gerakan organisasi Pertakina ini juga memiliki dampak kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan di Kabupaten Blitar. Hal tersebut ditandai dengan semakin fokusnya pemerintah daerah Kabupaten Blitar kepada organisasi pertakina yang menghasilkan dampak positif dalam peningkatan perekonomian bidang usaha ekonomi kreatif serta dijadikannya sebagai contoh bentuk model dalam menggerakkan IKM di Kabupaten Blitar.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan dengan mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi data guna menjawab berbagai pertanyaan pada permasalahan di lapangan.¹ Secara umum, terdapat tiga tahapan yang dilalui dalam metode penelitian, yang pertama adalah pengajuan pertanyaan, dimana pertanyaan akan muncul ketika seseorang tertarik pada suatu fenomena yang terjadi dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi guna mencari jawaban dari fenomena tersebut, yang kedua adalah pengumpulan data, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari informasi agar dapat menjawab rasa keingintahuan, informasi tersebut dapat diperoleh dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi, yang ketiga adalah penyajian jawaban, dimana jawaban tersebut diperoleh berdasarkan informasi yang telah diolah menjadi data dengan cara yang benar, komprehensif, dan logis.²

Didalam metode penelitian terdapat pendekatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan tipe penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan

¹ Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 2.

² J. R. Raco (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 3.

pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori.³ Sehingga, pendekatan tersebut sering digunakan pada penelitian ilmu politik karena sifatnya yang fleksibel dan dinamis, sehingga dapat meneliti secara mendalam tentang studi kasus.

Pada penelitian ini digunakan metode studi kasus, hal tersebut dikarenakan metode studi kasus. Menurut John W. Creswell Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁴

Penelitian kasus atau studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian

³ John W. Creswell (2008), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga Bandung : Pustaka Pelajar. hlm. 19.

⁴ Ibid.

kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian studi kasus lebih mendalam.⁵

Dengan demikian, penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu untuk memahami secara mendalam studi kasus gerakan organisasi Pertakina yang bergerak dalam membantu permasalahan purna TKI di Kabupaten Blitar.

Dengan metode studi kasus yang digunakan, maka jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sehingga data-data yang diperoleh adalah berdasarkan informasi yang tersedia dilapangan baik melalui observasi, wawancara maupun studi analisis dokumentasi.⁶

3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan cara untuk membuat keputusan yang tepat agar mendapatkan data. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi yang diteliti. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.⁷

Tabel 3.1

⁵ Suharsimi Arikunto (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta :Rieneka Cipta, hlm. 120.

⁶ Lexy J. Moleong (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 26.

⁷ Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Kelompok Intrans Publishing, Malang : 2015) hlm 35-36

Fokus Penelitian

No	Faktor	Indikator	Metode
1.	Pola Gerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui aktor yang menjalankan gerakan pertakina. 2. Mengetahui latar belakang terjadinya gerakan Pertakina. 3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor yang menghambat gerakan Pertakina. 	<p>Observasi dan Wawancara</p>
2.	Tujuan Gerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Tujuan gerakan. 2. Mengetahui cara organisasi Pertakina dalam menjalankan gerakan 	<p>Wawancara</p>
3.	Hasil dari Gerakan Pertakina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui hasil dari gerakan tersebut. 2. Mengetahui dampak yang terjadi sekarang dengan 	<p>Observasi dan Wawancara</p>



No	Faktor	Indikator	Metode
		adanya gerakan organisasi Pertakina.	

Sumber: Diolah Oleh Penulis tahun 2017

Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada gerakan swakelola dalam organisasi purna TKI dalam mensejahterakan anggotanya di organisasi Pertakina Kabupaten Blitar. Secara lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui :

Bagaimana pola gerakan para purna TKI untuk dapat keluar dari belenggu permasalahan sosial dengan cara gerakan swakelola yang di fokuskan dalam cara pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti,⁸ atau dengan kata lain pengambilan hasil data dari responden. Subyek penelitian bisa dikatakan orang-orang yang terlibat atau pelaku dalam sebuah realitas dan memberikan data atau informasi kepada peneliti tentang realitas yang

⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1990), hlm 34.



diteliti.⁹ Maka dalam penelitian tentang Gerakan swakelola organisasi purna TKI ini, subjek penelitian antara lain: Pengurus organisasi Pertakina Kabupaten Blitar, Anggota gerakan swakelola purna TKI atau para TKI yang ikut dalam kegiatan organisasi Pertakina dan *stackholder* yang terlihat dalam aktivitas fenomena gerakan ini.

Kemudian obyek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu cara penyelesaian kondisi permasalahan anggota purna TKI melalui gerakan swakelola organisasi purna TKI di organisasi Pertakina Kabupaten Blitar, dengan mempertanyakan metode cara dan pola gerakan apa yang dilakukan oleh kelompok gerakan swakelola purna TKI tersebut. Selain itu juga melibatkan pihak terkait seperti *stackholder* dalam meraih kesuksesan gerakan ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Organisasi Pertakina yang memiliki kantor di Dusun Tawang Sari Desa Garum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih banyaknya TKI di Kabupaten Blitar serta ditemukannya gerakan swakelola purna TKI yang bertujuan menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi di Kabupaten Blitar.

3.4 Teknik Penentuan Informan

⁹ Moleong, Lexy J, *metode penelitian kualitatif* (edisi Revisi), Rosdakarya, Bandung : 2007 hlm 94

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 91.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive Methode*, yang artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal di organisasi Pertakina Kabupaten Blitar.¹¹

Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian secara maksimal. Oleh sebab itu orang yang menjadi informan harus memiliki kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Subjek yang menguasai atau memahami gerakan swakelola purna TKI organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.
2. Subjek yang terlibat dalam aktivitas gerakan tersebut.
3. Subjek yang mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
4. Subjek harus menyampaikan informasi dengan jelas berdasarkan dengan kenyataan.
5. Subjek yang masih aktif pada Organisasi Pertakina yang menjadi sasaran tujuan penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm 221

6. Subjek yang menjadi pengurus maupun anggota organisasi Pertakina.

Dalam penelitian ini terdapat tiga informan, yaitu informan kunci, informan pendukung dan informan tambahan lainnya sebagai berikut:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah yang memiliki pengetahuan khusus mengenai topik tertentu, dan tidak harus pemimpin.¹² Dalam penelitian ini, informan kunci adalah pencetus gerakan dan ketua organisasi Pertakina. Pencetus dari gerakan swakelola ini adalah Sucipto yang dijadikan sebagai informan kunci karena memiliki informasi latar belakang dan tujuan dari berdirinya organisasi Pertakina. Kemudian ketua organisasi Pertakina sendiri yaitu Sulistianingsih sebagai informan kunci karena memiliki informasi tentang kemajuan dan inovasi-inovasi gerakan yang dilaksanakan pada saat ini untuk mencapai sasaran dan target dari organisasi gerakan Pertakina di Kabupaten Blitar.

2. Informan Pendukung

Dalam penelitian ini informan pendukung adalah dari pihak anggota organisasi purna TKI yang ikut dalam gerakan swakelola organisasi Pertakina. Selain itu ada *stackholder* yang terlibat dalam proses yaitu

¹² Mikhesen B. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. (Buku Obor. Jakarta 2011) hlm 18

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai salah satu yang berperan dalam proses pemberdayaan IKM purna TKI.

Tabel 3.2 Kapasitas Penentuan Informan

No	Nama	Jabatan	Kapasitas	Keterangan
1	Sucipto	Bendahara	Informan Kunci	Sebagai pencetus gerakan organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar
2	Sulistianingsih	Ketua	Informan Kunci	Sebagai ketua organisasi Pertakina dan sekaligus yang menjalankan organisasi Pertakina
3	Inasari	Anggota	Informan Pendukung	Mengambil informasi dari anggota yang mengikuti organisasi Pertakina
4	Mimin Nurmia	Anggota	Informan Pendukung	Mengambil informasi dari anggota yang mengikuti organisasi Pertakina
5	Ifa Harisma	Korlap	Informan Pendukung	Mengambil informasi dari anggota yang mengikuti organisasi
6	Supriati	Anggota	Informan	Mengambil

No	Nama	Jabatan	Kapasitas	Keterangan
			Pendukung	informasi dari anggota yang mengikuti organisasi
7	Eko Purwanto	Korlap	Informan Pendukung	Mengambil informasi dari anggota yang mengikuti organisasi
8	Yuni	Korlap	Informan Pendukung	Mengambil informasi dari anggota yang mengikuti organisasi
9	Deny Ramdhani	Disperindag Kabupaten Blitar	Informan Pendukung	Mengambil informan dari dinas yang terkait dengan bidang tujuan organisasi Pertakina
10	Diana	Disnaker Kabupaten Blitar	Informan Pendukung	Mengambil informan dari dinas yang terkait dengan bidang tujuan organisasi Pertakina
11	Lutfiana	Dinsos Kabupaten Blitar	Informan Pendukung	Mengambil informan dari dinas yang terkait dengan bidang tujuan organisasi Pertakina

Sumber: Dokumen data peneliti 2017

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini supaya dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, dan kepustakaan.

1. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data.

Observasi merupakan pengumpulan data yang langsung dari lapangan.¹³ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi peneliti bersama partisipan, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati serta ikut dalam kegiatan untuk mendapatkan data yang maksimal dalam kegiatan tersebut.

Observasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada subyek penelitian dan kondisi lapangan. Peneliti mengamati perilaku anggota purna TKI dalam kegiatan melakukan gerakan swakelola pemberdayaan. Kemudian di dokumentasikan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan gerakan swakelola purna TKI, peneliti mengamati perilaku anggota organisasi Pertakina dalam memberikan informasi dan memberi tanggapan ketika ada pihak luar yang masuk dalam kegiatan tersebut. Adapun hasil dari data langsung yang diperoleh peneliti akan diolah dalam bentuk kata-kata atau tulisan.

¹³ Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2010) Hlm. 112

2. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab terhadap subyek atau informan yang dipilih dengan berlandaskan tujuan dari penelitian. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan informasi mengenai permasalahan secara mendalam sehingga peneliti memperoleh data yang akurat dan maksimal karena data diperoleh secara langsung tanpa perantara.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam yang dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sudah disiapkan untuk informan yang telah dipilih sebagai informan kunci, informan pendukung dan informan lainnya. Wawancara dilakukan secara informal menyesuaikan dengan kondisi dari informan, guna mendapatkan data yang lebih fokus dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan data yang maksimal. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data awal yang diperlukan peneliti, yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, berupa laporan dan catatan-catatan lainnya. Penelusuran dokumen diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik

yang memuat berbagai informasi tentang perjuangan maupun kegiatan dari Gerakan swakelola purna TKI.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan.¹⁴

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, informan pendukung dan informan lainnya yaitu orang yang benar-benar mengetahui obyek penelitian. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.¹⁵

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

¹⁴ Lihat di <http://pastiguna.com/teknik-analisis-data/> pada tanggal 18 maret 2017 pukul 13.20 Wib

¹⁵ Andi Misna *eJournal Administrasi Negara*, 3 (2) 2015 : 521 - 533 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id 2015. hlm 527

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi data. Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sehingga triangulasi data dikelompokkan menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, teknik pengumpulan data ruang dan waktu, kemudian

sumber data yang dikumpulkan dari orang-orang yang berbeda yang melakukan aktivitas yang sama, dan data-data didapat dari tempat yang berbeda, serta waktu pengumpulan yang berbeda.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini menggunakan tiga macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa wawancara, observasi dan dokumen berdasarkan catatan dan data yang diperlukan peneliti. Hasil penelitian diperoleh dari teknik triangulasi data yang berpengaruh adalah dari hasil wawancara. Data tersebut sangat berpengaruh dan mempermudah data yang didapat oleh penulis.



BAB IV

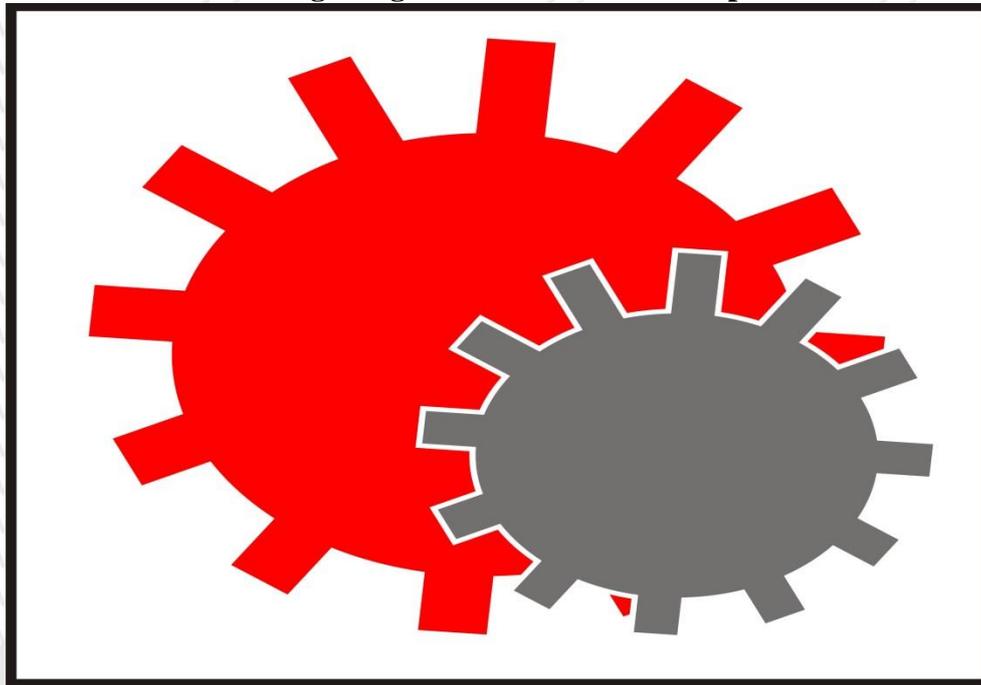
GAMBARAN UMUM

4.1 Organisasi Pertakina

Gerakan swakelola organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar muncul dengan tidak sengaja begitu saja. Pertakina muncul dilatarbelakangi oleh banyak sekali permasalahan sosial yang meliputi kondisi ekonomi, keluarga hingga permasalahan yang didapat pada saat masa kerja maupun pasca kerja di luar negeri. Dari permasalahan sosial itulah timbul perasaan senasib diantara para TKI untuk melakukan kegiatan yang bertujuan merubah kondisi mereka untuk mencapai ketahanan ekonomi.

Awal terjadinya gerakan swakelola organisasi Pertakina ini bermula dari Dusun Tremas Desa Kebun Duren Kecamatan Nglegok di Kabupaten Blitar. Di dusun tersebut 90% persen penduduknya adalah tenaga kerja indonesia yang mengadu nasib ke luar negeri.¹ Latar belakang penduduknya mayoritas menjadi TKI bermula pada saat dusun tersebut mengalami bencana alam lahar dingin pada tahun 1990 yang mengakibatkan hancurnya rumah dan sumber mata pencaharian ekonomi mereka sehari-hari yang mayoritas masyarakatnya adalah bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Dengan permasalahan tersebut mendorong penduduk Dusun Tremas menjadi TKI.

¹Data wawancara dengan narasumber.2017

Gambar 4.1 Logo Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar

Sumber: Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar 2017

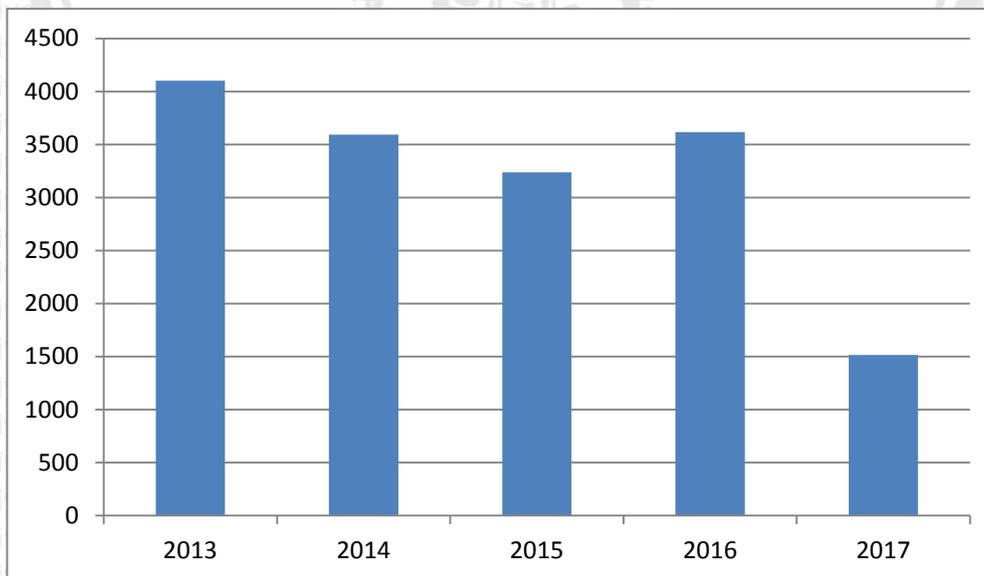
Dengan dorongan ekonomi tersebut banyak dari anggota keluarga di Dusun Tremas mengadu nasib keluar negeri untuk mencari sumber rezeki untuk mengatasai permasalahannya. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadi solusi alternatif bagi mereka. Hal ini dikarekan tidak sedikit para TKI yang justru mengalami masalah lagi seperti perceraian, kekerasan di luar negeri, penipuan hingga kasus anak yang melakukan tindakan kriminal ketika orang tuanya berada di luar negeri.

Permasalahan tersebut seiring sejalan menjadikan kondisi TKI harus membuat sebuah solusi alternatif yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sinilah peran Pertakina sebagai jalan solusi yang berperan sebagai wadah perkumpulan TKI yang ingin merubah nasibnya agar dapat

berdikari di negeri sendiri tanpa harus kembali lagi menjadi TKI di negeri lain.

Menurut catatan Disnaker Kabupaten Blitar, angka angkatan kerja yang pergi ke luar negeri setiap tahun meningkat. Peningkatan tersebut didasari adanya dorongan ekonomi yang mengharuskan pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Jumlah peningkatan tersebut berasal dari calon TKI yang baru dan juga eks TKI yang memang kembali lagi bekerja karena terikat kontrak. Dibawah ini adalah tabel dimana setiap tahunnya jumlah penduduk Kabupaten yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri mencapai ribuan. Hal ini menjadikan Kabupaten Blitar menjadi pengirim tenaga ke luar negeri nomer dua setelah Kabupaten Malang di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.1 Jumlah Angkatan Kerja TKI dari Kabupaten Blitar



Sumber: Disnaker Kabupaten Blitar 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa minat penduduk Kabupaten Blitar untuk bekerja di luar negeri sangat banyak. Dari sinilah Pertakina mencoba untuk merealisasikan tujuan mereka dengan membantu TKI untuk mengolah potensinya dengan mendorong purna TKI agar dapat mengelola dana remintansi yang mereka dapatkan ketika bekerja di luar negeri untuk memakmurkan hidupnya tanpa harus bergantung bekerja di negeri lain.

Dalam menjalankan peranannya, Pertakina memiliki susunan organisasi. Susunan organisasi tersebut berperan dalam mensukseskan gerakan Pertakina agar memenuhi pelayanan terpadu dalam memberikan bantuan akses kepada anggota Pertakina dan TKI lainnya di Kabupaten Blitar.

Tabel 4.2 Susunan Pengurus Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar 2017

No	Nama	Jabatan	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
1	Sulistiyarningsih	Ketua	Hongkong	Keripik Usus, Opak Japit
2	Anis Dariati	Wakil Ketua	Brunei	Krupuk, Batik Ikat
3	Peni Diah Wati	Sekretaris	Arab Saudi	Roti Kering
4	Nur Sholikhah	Sekretaris	Taiwan	Kerajinan Tas, Kacang Sembunyi
5	Tarmini	Sekretaris	Taiwan	Sirup Sirsat
6	Sucipto	Bendahara	Singapura	Kripik Singkong, Kripik Jangkrik
7	Lilik Setyowati	Bendahara	Saudi Arabia	Kue Kering, Krupuk Mandot
8	Masri;ah	Bendahara	Saudi Arabia	Kopi, Jagung Instant, Kacang Goreng Kulit

Sumber: Pertakina Kabupaten Blitar 2017

Selain memiliki struktur organisasi, Pertakina juga memiliki pengurus kordinator lapangan di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar. Kordinator lapangan ini berfungsi sebagai pembantu dalam memfasilitasi pelayanan yang lebih mendalam dalam upayannya memperluas gerakan di Kabupaten Blitar.

Selain fungsi tersebut, dengan adanya kordinator lapangan dapat mempermudah anggota dalam menyampaikan aspirasi dan juga permasalahannya, sehingga dapat mempercepat proses bantuan-bantuan yang ditujukan kepada para anggota dan TKI yang membutuhkan. Karena perlu di ketahui, Kabupaten Blitar memiliki wilayah luas yang mencapai 1.589 km^{2,2} yang mengharuskan adanya kordinator lapangan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Di bawah ini adalah tabel susunan kordinator lapangan organisasi Pertakina Kabupaten Blitar.

Tabel 4.3 Kordinator Lapangan Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar

No	Nama	Wilayah Korlap	Asal Negara TKI Bekerja
1	Bambang Agus	Sanan Kulon	Malaysia
2	Khusnul Laila	Ponggok	Arab Saudi
3	Nur Alfin	Nglegok	Taiwan
4	Zainul Rohman	Wonodadi	Malaysia
5	Lili Setyowati	Srengat	Singapura
6	Ifa Harisma	Talun	Arab Saudi
7	Tumia	Kanigoro	Arab Saudi
8	Oni Sutanto	Gandusari	Malaysia
9	Yuni	Garum	Hongkong
10	Eko Purwanto	Wlingi	Malaysia

² luas wilayah Kabupaten Blitar diakses dari, www.kabupatenblitar.go.id pada 9 juli 2017 pukul 19.33 Wib.

No	Nama	Wilayah Korlap	Asal Negara TKI Bekerja
11	Candara Sari	Kademangan	Hongkong
12	Hani	Udanawu	Taiwan
13	Tumari	Wonotirto	Malaysia
14	Umi Atikah	Panggungrejo	Hongkong
15	Eni Rahayu	Kesamben	Hongkong
16	Yuni Fatmawati	Selorejo	Singapura
17	Hendro	Selopuro	Malaysia
18	Karin	Bakung	Taiwan
19	Zulaikah	Sutojayan	Hongkong
20	Anwari	Binangun	Malaysia
21	Endang Suprpti	Wates	Taiwan

Sumber: Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar 2017

Organisasi Pertakina yang berdiri di Kabupaten Blitar sangat berperan aktif dalam membantu permasalahan sosial yang dihadapi oleh purna TKI. Organisasi ini muncul dan bergerak dengan tujuan memberikan solusi dan harapan dalam permasalahan purna TKI khususnya di bidang ekonomi dan sosial.

Hal yang menarik dalam organisasi Pertakina ini sangatlah berbeda dengan gerakan-gerakan lain yang sama-sama bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan purna TKI yang berada di Kabupaten Blitar.

Hal yang unik dari gerakan organisasi Pertakina ini adalah pada kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut adalah dengan mengadakan pendidikan pemberdayaan di sektor ekonomi.

Pemberdayaan tersebut kebanyakan di bidang pendirian usaha industri kecil menengah. Pemberdayaan dilakukan bertujuan untuk mencetak potensi-potensi keahlian dan sumber daya alam yang melimpah

untuk kesejahteraan kehidupan anggota organisasi Pertakina. Para anggota tersebut dituntut untuk menguasai keahlian dalam bidang usahanya.

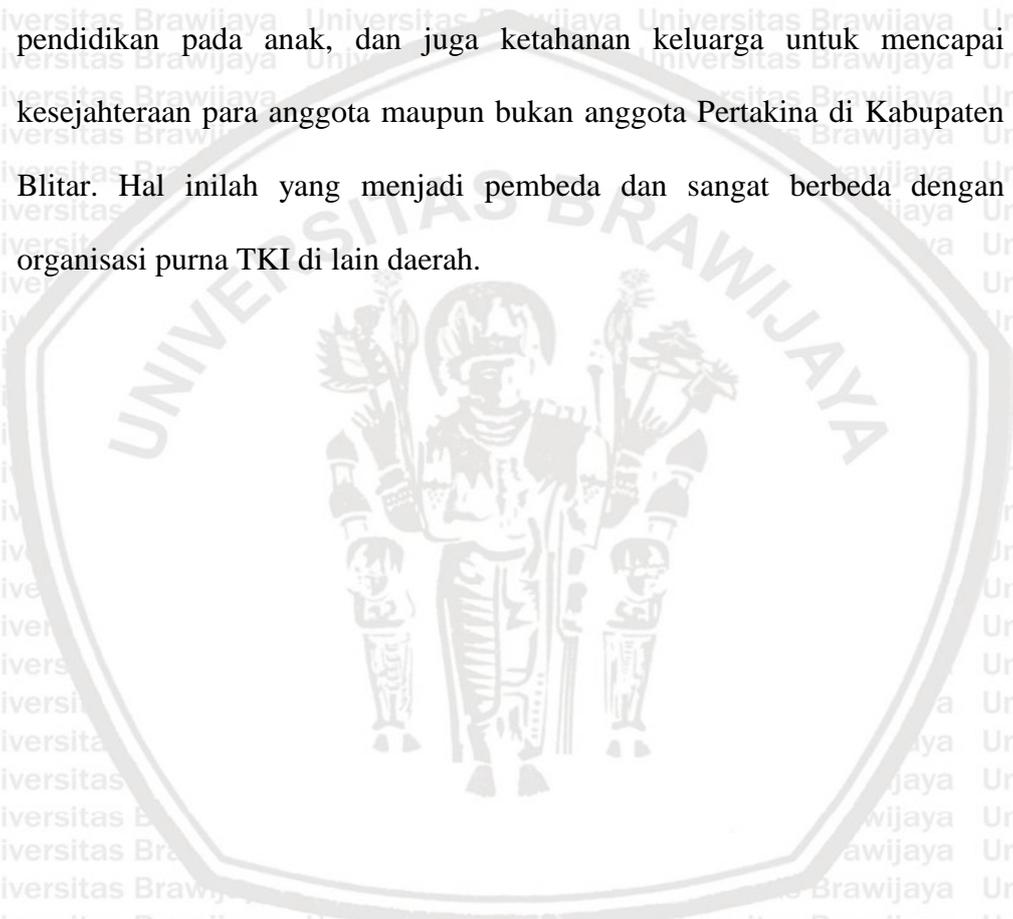
Pemberdayaan tersebut antara lain dengan adanya kegiatan pendidikan serta adanya bantuan dalam hal pengendalian, fasilitasi, dan pelatihan yang bertujuan menghasilkan anggota purna TKI yang berkompeten dalam memperbaiki perekonomiannya dan kondisi di sosial masyarakat. Pengendalian tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan usaha yang ditekuni oleh anggota Pertakina dengan melakukan survei penilaian peningkatan intensitas perkembangan usahanya. Kemudian adanya fasilitasi bertujuan untuk mempermudah dan meringankan beban TKI dalam melakukan usaha. Fasilitasi tersebut seperti bantuan dalam proses usaha dari alat produksi, bantuan informasi kelayakan barang produksi hingga promosi pemasaran.

Kemudian pelatihan dalam kegiatan pemberdayaan di organisasi Pertakina merupakan hal yang sangat terpenting dan menjadi yang utama dalam gerakan organisasi Pertakina di Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut menjadi sangat penting karena mempengaruhi berhasil atau tidaknya organisasi Pertakina dalam menjalankan misinya. Pelatihan tersebut seperti melakukan pendidikan karakter dalam memotivasi dan merubah pola fikiran para anggota Pertakina. Karena tidak mudah untuk mengajak para anggota Pertakina dalam melakukan kegiatan gerakan swakelola purna TKI tersebut.

Di lain sisi, pelatihan tersebut juga bertujuan mempercepat keahlian bagi

anggota Pertakina dalam menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Blitar untuk menghasilkan produk-produk IKM yang inovatif dan layak bersaing di pasaran.

Selain pada bantuan pemberdayaan, organisasi Pertakina juga memfokuskan ke hal yang lain seperti bantuan hukum, kesehatan, pendidikan pada anak, dan juga ketahanan keluarga untuk mencapai kesejahteraan para anggota maupun bukan anggota Pertakina di Kabupaten Blitar. Hal inilah yang menjadi pembeda dan sangat berbeda dengan organisasi purna TKI di lain daerah.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pola dan Peran Gerakan Organisasi Pertakina

Organisasi Pertakina memiliki gerakan yang berbeda dengan gerakan masyarakat sipil lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada pola gerakan yang lebih dinamis dan tidak berpusat pada pemberdayaan saja. Hal tersebut tidak lain karena adanya aktor gerakan yang menginginkan organisasi Pertakina sebagai alat bantuan berbagai hal ditujukan kepada purna TKI dan keluarganya. Mc Adam dan Mc Charty menjelaskan, dalam melakukan peranan perlu memakai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan proses pembingkaiian (*framing process*) yang merupakan proses dimana aktor-aktor gerakan memfokuskan bagaimana cara menguasai ide-ide agar menarik calon pendukung.³

Pertakina saat ini penting sekali keberadaanya saat ini ditengah kondisi banyaknya purna TKI yang mengalami masalah dan membebani hidupnya. Pertakina mencoba memberikan sebuah ide gagasan dan terobosan terbaru melewati peluang-peluang yang ada di negeri sendiri untuk kesejahteraan para TKI khususnya anggota Pertakina.

Dalam usahanya menyebarluaskan pengaruhnya kepada khalayak umum khususnya TKI, Pertakina membuat sebuah gerakan yang lebih kongkrit dalam membantu anggota TKI dalam menghadapi

³ op. cit.

permasalahannya. Pola gerakan yang dilakukan oleh Pertakina adalah dengan menggunakan pemberdayaan di bidang kegiatan ketahanan ekonomi, membangun koperasi, bantuan hukum advokasi, bantuan ketahanan keluarga serta bantuan dalam pemasaran produk dari hasil kegiatan usahanya. Saat ini organisasi Pertakina memiliki jumlah anggota yang semakin banyak setiap tahunnya. Dibawah ini adalah anggota dari organisasi Pertakina yang semakin berkembang. Oberschall dalam Locher (dalam Singh 2010:130), keberhasilan dan kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi⁴. Saat ini anggota yang melakukan bergabung kedalam organisasi semakin meningkat.

Tabel 5.1 Daftar Anggota Organisasi Pertakina

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
1	Musri'ah	Anggota	Kecamatan Wonodadi	Taiwan	Keripik Gambir
2	Siti Muamanah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Kue Kering
3	Henita Indah	Anggota	Kecamatan Udanawu	Taiwan	Kue Kering
4	Siti Latifah	Anggota	Kecamatan Udanawu	Hongkong	Keripik
5	Sumarsih	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Keripik Gambir
6	Dian Mustini	Anggota	Kecamatan Nglegok	Hongkong	Kue Kering
7	Srinatun	Anggota	Kecamatan	Taiwan	Kue

⁴ op. cit

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
			Nglegok		Kering
8	Lulami	Anggota	Kecamatan Nglegok	Singapore	Keripik
9	Samiyah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Singapore	Keripik Gambir
10	Umi Latifah	Anggota	Kecamatan Nglegok	Singapore	Kue Kering
11	Mamik Hartiwi	Anggota	Kecamatan Nglegok	Hongkong	Kue Kering
12	Masrikatun	Anggota	Kecamatan Kanigoro	Singapore	Keripik
13	Indah Purnawanti	Anggota	Kecamatan Nglegok	Taiwan	Keripik Gambir
14	Iyah Asisiyah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Taiwan	Kue Kering
15	Yeti	Anggota	Kecamatan Ponggok	Taiwan	Kue Kering
16	Erna Dwi S	Anggota	Kecamatan Ponggok	Hongkong	Keripik
17	Sulastriningsih	Anggota	Kecamatan Ponggok	Hongkong	Keripik Gambir
18	Purwati	Anggota	Kecamatan Ponggok	Hongkong	Kue Kering
19	Sriwinarni	Anggota	Kecamatan Ponggok	Hongkong	Kue Kering
20	Alfiyah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Singapore	Keripik
21	Mujiati	Anggota	Kecamatan Gandusari	Malaysia	Keripik Gambir
22	Wahyudiono	Anggota	Kecamatan Gandusari	Malaysia	Kue Kering
23	Adi Santoso	Anggota	Kecamatan Gandusari	Malaysia	Kue Kering
24	Nanik Setyowati	Anggota	Kecamatan Ponggok	Taiwan	Keripik
25	Sri Sunarwi	Anggota	Kecamatan Ponggok	Taiwan	Keripik Gambir
26	Purwati	Anggota	Kecamatan Wlingi	Malaysia	Kue Kering

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
27	Nurul Qibtiyah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Kue Kering
28	Titik Ningtyas	Anggota	Kecamatan Ponggok	Hongkong	Keripik
29	Wijiati	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Keripik Gambir
30	Samsiyah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Kue Kering
31	Mugiati	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Kue Kering
32	Bibin Arifah	Anggota	Kecamatan Wlingi	Hongkong	Keripik
33	Sri Endang L	Anggota	Kecamatan Wlingi	Malaysia	Keripik Gambir
34	Lilik Astutin	Anggota	Kecamatan Wlingi	Malaysia	Kue Kering
35	Siti Zulaikah	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
36	Enik Kusniawati	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Keripik
37	Saryanah	Anggota	Kecamatan Kanigoro	Taiwan	Keripik Gambir
38	Siti Mutiah	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
39	Mujiati	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
40	Sri Utami	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Keripik
41	Endang Esawnti	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Keripik Gambir
42	Inasari	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
43	Sumartini	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Kue Kering
44	Enik Ernawati	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Keripik
45	Lilik Istirawati	Anggota	Kecamatan Kanigoro	Malaysia	Keripik Gambir
46	Tarwiyati	Anggota	Kecamatan	Malaysia	Kue

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
			Kanigoro		Kering
47	Enik Lestari	Anggota	Kecamatan Gandusari	Malaysia	Kue Kering
48	Sriasih	Anggota	Kecamatan Wonotirto	Taiwan	Keripik
49	Halim N	Anggota	Kecamatan Kanigoro	Malaysia	Keripik Gambir
50	Nurul Laily	Anggota	Kecamatan Nglegok	Malaysia	Kue Kering
51	Hastuti P	Anggota	Kecamatan Nglegok	Malaysia	Kue Kering
52	Indah Karnasih	Anggota	Kecamatan Talun	Arab Saudi	Keripik
53	Khoirul Naim	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Keripik Gambir
54	Musripah	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
55	Sri Rahayu	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
56	Sunarni	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Pertanian
57	Mohamad Arifin	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik Gambir
58	Mestamaji	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
59	Nanang Rudianto	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
60	Suwandi	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik
61	Bayu Purniawan	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik Gambir
62	Sumardianto	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
63	Mujiono	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
64	Sugiono	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik
65	Aris Setiawan	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik Gambir

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
66	Pugoh Ainur	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
67	Mahmud Ali	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
68	Imam Mujali	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik
69	Dawin Ansori	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik Gambir
70	Chairul Amri	Anggota	Kecamatan Selopuro	Malaysia	Kue Kering
71	Dawin Ansori	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Kue Kering
72	Duladi	Anggota	Kecamatan Selopuro	Malaysia	Keripik
73	Miftahul ma'na	Anggota	Kecamatan Sanan Kulon	Singapore	Keripik Gambir
74	Ratna Nihayati	Anggota	Kecamatan Nglegok	Malaysia	Kue Kering
75	Suprihatin	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
76	Siti Rokayah	Anggota	Kecamatan Udanawu	Arab Saudi	Keripik
77	Eni Sukarsih	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Keripik Gambir
78	Suryanah	Anggota	Kecamatan Kanigoro	Malaysia	Kue Kering
79	Robi;ah adawiyah	Anggota	Kecamatan Sanan Kulon	Brunei	Kue Kering
80	Rohmawati	Anggota	Kecamatan Udanawu	Taiwan	Keripik
81	Ayu Rahardiatin	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Kecap
82	Siti Munafi'ah	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Kue Kering
83	Istiqomah	Anggota	Kecamatan Sanan Kulon	Malaysia	Kue Kering
84	Usman	Anggota	Kecamatan Srengat	Malaysia	Keripik
85	Indah	Anggota	Kecamatan	Taiwan	Keripik

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
	Wahyudi		Wonodadi		Gambir
86	Mujiono	Anggota	Kecamatan Wonodadi	Malaysia	Kue Kering
87	Shan'ani	Anggota	Kecamatan Bakung	Hongkong	Tahu
88	Sri Wahyuni	Anggota	Kecamatan Selorejo	Malaysia	Keripik
89	Nikmatur Rohmah	Anggota	Kecamatan Wonodadi	Malaysia	Keripik Gambir
90	Sunarmi	Anggota	Kecamatan Wonotirto	Hongkong	Kue Kering
91	Siti Karomah	Anggota	Kecamatan Ponggok	Arab Saudi	Minuman
92	Sukani	Anggota	Kecamatan Wonotirto	Malaysia	Keripik
93	Indah Wulandari	Anggota	Kecamatan Sanan Kulon	Taiwan	Keripik Gambir
94	Mimin Nurmia	Anggota	Kecamatan Wlingi	Taiwan	Kue Kering
95	Umi Falimatus Zahro	Anggota	Kecamatan Udanawu	Arab Saudi	Kue Kering
96	Sriatin	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Keripik
97	Ayu Lardiyanti	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Keripik Gambir
98	Nursalim	Anggota	Kecamatan Ponggok	Malaysia	Kopi
99	Ina Wahyu. A	Anggota	Kecamatan Kademangan	Taiwan	Kue Kering
100	Siti Fatimah	Anggota	Kecamatan Sanan Kulon	Taiwan	Keripik
101	Supriati	Anggota	Kecamatan Talun	Arab Saudi	Keripik Gambir
102	Bhara	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Kue Kering
103	Gini	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Kue Kering
104	Sucipto	Anggota	Kecamatan Talun	Malaysia	Keripik

No	Nama	Jabatan	Alamat	Asal Negara TKI Bekerja	Jenis Usaha
105	Suprihatin	Anggota	Kecamatan Talun	Hongkong	Keripik Gambir
106	Binti Munta'atin	Anggota	Kecamatan Kademangan	Malaysia	Pertanian
107	Rusma Ali	Anggota	Kecamatan wonodadi	Arab Saudi	Kue Kering
108	Ida Dami	Anggota	Kecamatan wonodadi	Arab Saudi	Keripik

Sumber: Dokumen Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar 2017

Dari daftar anggota di atas merupakan anggota aktif sampai Juni tahun 2017. Kebanyakan mereka adalah purna TKI yang bergabung karena perasaan senasib dan mendorong purna TKI lainnya untuk ikut dalam organisasi Pertakina dengan tujuan agar dapat merubah nasibnya setelah pulang dari negara kerjanya di luar negeri. Adapun ketentuan untuk bergabung dalam organisasi Pertakina ini adalah maksimal lima tahun sesudah masa pulang bekerja di luar negeri. Hal tersebut demikian karena adanya peraturan dan juga pertimbangan tersendiri yang diterapkan organisasi Pertakina Kabupaten Blitar.

Menurut Mc Charty mobilisasi sumber daya sangat penting dalam melakukan strategi memunculkan gerakan sosial. Dimana mobilisasi sumber daya adalah sejumlah cara kelompok gerakan melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya menciptakan taktik gerakan dan bentuk sebuah

gerakan.⁵ Hal tersebut mempengaruhi keberhasilan sebuah gerakan sosial dimasyarakat untuk dijadikan daya tarik bagi para pengikut gerakan karena memiliki insentif yang dapat mawadahi kepentingan-kepentingan dari para partisipan gerakan. Seperti halnya kasus program memerangi kemiskinan (*war on poverty*) yang dicanangkan oleh pemerintahan John F. Kennedy dan Lindon B. Johnson di Amerika Serikat pada awal dekade tahun 1960-an turut menciptakan iklim pembaruan.⁶

Pertakina memiliki cara-cara yang berbeda dengan organisasi gerakan sosial yang pada umumnya tidak dimiliki oleh gerakan yang bersifat berdiri mandiri yang bergerak dari akar tanah. Penggunaan mobilisasi sumber daya dalam gerakan ini sangat diterapkan dengan baik, sehingga mobilisasi sumber daya keahlian dari aktor serta anggota yang melakukan tindakan kolektif atas dasar persamaan senasib bersama menghasilkan berbagai macam produk taktik yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan dan layanan bagi anggota Pertakina maupun eks TKI.

Produk bantuan dan layanan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Ketahanan Ekonomi

Tujuan pertama dari kegiatan adanya Pertakina adalah membantu para anggota untuk membantu mensukseskan ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi ini adalah dengan cara melakukan

⁵ Jurnal. Ahmad Sufyan. *Gerakan sosial masyarakat pegunungan kendeng utara melawan pembangunan pabrik semen di kabupaten rembang*. journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntse445f6d167full.pdf . hlm 6

pemberdayaan di bidang usaha yang ditekuni oleh anggotanya.

Dengan kata lain gerakan organisasi Pertakina tidak memaksakan anggotanya untuk mengikuti usaha yang tidak ditekuninya. Misalnya adalah jika ada anggota yang memiliki bisnis usaha dalam peternakan maka tidak akan dipaksakan dalam kegiatan usaha seperti IKM. Cara tersebut adalah agar kegiatan bisnis yang dilakukan oleh anggotanya tidak mengalami gangguan kedepannya.

Ketahanan ekonomi ini sangat penting sekali dalam upaya membendung anggota Pertakina untuk tidak bekerja kembali ke luar negeri. Ketahanan ekonomi diperlukan sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan. Dengan adanya bantuan ketahanan ekonomi diharapkan agar anggota siap menghadapi kebutuhan ekonomi dan permasalahan serta sanggup menyelesaikannya dengan baik tanpa mempengaruhi kegiatan usahanya.

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu pola dalam gerakan organisasi Pertakina untuk menjawab tantangan permasalahan yang dinamis dalam kehidupan para anggota Pertakina. Dengan memberikan bantuan ketahanan ekonomi lewat pemberdayaan dan fasilitas lainnya, diharapkan anggota dapat hidup sejahtera.

2. Membangun Koperasi

Koperasi simpan pinjam yang didirikan organisasi Pertakina ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan untuk mempercepat bantuan permodalan bagi anggota yang memiliki kekurangan dana modal dalam menjalankan aktivitas kegiatan usaha. Koperasi tersebut sebagai sarana yang dapat membantu anggota Pertakina agar tetap dapat menjalankan usaha.

Pembangunan koperasi pertakina ini adalah wujud dari keseriusan gerakan Pertakina dalam membangun pribadi anggota Pertakina untuk bersaing di kawasan regional maupun global untuk berpartisipasi dalam ekonomi bebas asean yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya koperasi simpan pinjam Pertakina ini adalah merupakan pola gerakan yang dirancang untuk akses mempermudah anggota untuk mendapatkan permodalan. Di samping itu, Koperasi ini sebagai wadah untuk mengenalkan produk-produk Pertakina yang dijual belikan agar masyarakat lebih mengenal produk Pertakina dan sebagai sarana promosi kepada masyarakat luas.

3. Bantuan Hukum Advokasi

Sebagai salah satu organisasi pemerhati kondisi sosial masyarakat di Indonesia, Pertakina yang berasal dari Kabupaten Blitar juga memiliki fungsi yang dinamis dan berbeda di bandingkan

dengan gerakan organisasi lainnya. Pertakina selain memiliki fungsi dari pemberdayaan juga memiliki fungsi lain yaitu memberikan bantuan hukum kepada anggota TKI yang berasal dari Kabupaten Blitar.

Bantuan Hukum Advokasi ini dilakukan untuk para eks TKI yang mengalami permasalahan hukum. Bantuan yang diberikan Pertakina tersebut diberikan kepada korban atau pasca pulang di dari luar negeri maupun yang masih bekerja di luar negeri. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha Pertakina menjalankan fungsinya sebagai bantuan fasilitasi kepada anggota dan keluarga Pertakina di Kabupaten Blitar.

Banyak yang permasalahan yang menimpa para TKI yang berasal dari Kabupaten Blitar. Seperti dikutip dari pernyataan Sucipto selaku pengurus organisasi Pertakina, beliau mengemukakan bahwa di bulan juni ini ada kasus yang menimpa saudari SF purna TKI asal negara tujuan Malaysia yang kehilangan aset tanah dan bangunan yang disertifikasikan serta di jual oleh saudaranya sendiri sehingga SF saat ini tidak memiliki rumah dan harus menetap di rumah kerabat lainnya. Kasus tersebut adalah sebagian kecil permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di Kabupaten Blitar.

Bantuan hukum advokasi terhadap anggota Pertakina ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi permasalahan yang

terjadi pada anggotanya. Gerakan ini tidak bertujuan mencari keuntungan semata, akan tetapi didasari oleh rasa solidaritas tinggi oleh sesama anggota Pertakina saat bekerja di negara tujuan dan pasca bekerja dari luar negeri.

4. Bantuan Ketahanan Keluarga

Yang tidak kalah penting dalam peran dari organisasi Pertakina adalah bantuan ketahanan keluarga. Bantuan tersebut adalah sebagai cara untuk mempertahankan keluarga TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Karena tidak jarang kasus perceraian yang di alami oleh TKI sangat tinggi mencapai puluhan pasangan setiap tahunnya yang ditangani oleh Pertakina Kabupaten Blitar.⁷ Hal tersebut terjadi karena banyak terjadi konflik ketika salah satu dari pasangan TKI sedang bekerja di luar negeri.

Kasus perceraian dari pasangan TKI ini menjadi salah satu penyumbang permasalahan kehidupan jangka panjang. Sering dijumpai TKI menjadi frustrasi dan mengalami gangguan jiwa karena di akibatkan keluarganya yang mengalami perpecahan. Hal tersebut terjadi karena konflik perselingkuhan dari para TKI maupun keluarga yang tinggal dirumah. Kebanyakan yang mengalami kasus perceraian tersebut menyeret dampak negatif kepada keluarganya, khususnya anak.

⁷ Hasil wawancara dari pengurus organisasi Pertakina Kabupaten Blitar 2017

Kasus kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Blitar juga sangat tinggi. Dimana menurut catatan dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk tahun 2015-2017 adalah 235 kasus.⁸ Kasus tersebut ada yang dikenakan hukuman pidana karena tingkat permasalahannya tinggi, seperti kasus pembunuhan, kenakalan remaja, pencurian, minum-minuman keras hingga pengkonsumsian obat terlarang seperti narkoba.

Tujuan dari bantuan ketahanan keluarga organisasi yang dilakukan oleh Pertakina ini adalah sebagai bentuk solidaritas dan juga untuk menyelesaikan dan mengurangi tingkat kehancuran rumah tangga yang di alami oleh para anggota Pertakina dan juga TKI lainnya. Sehingga permasalahan tersebut untuk kedepannya dapat diminimalisir dan dapat mempertahankan keutuhan keluarga TKI.

Bantuan yang dilakukan oleh Pertakina sendiri meliputi musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan TKI. Organisasi Pertakina juga melakukan penyuluhan kepada para anggota TKI untuk menghindari dari persoalan yang berurusan dengan ketahanan keluarga. Dengan pentingnya ketahanan keluarga adalah sebagai bentuk untuk menghindarkan anak-anak TKI terlantar karena kurangnya perhatian.

⁸ Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2017

5. Pemasaran Produk

Pemasaran produk usaha yang dilakukan oleh anggota Pertakina menjadi target utama dalam membangun terciptanya kemandirian anggota untuk meraih kesejahteraan sosial. Pemasaran ini adalah bentuk bantuan pendidikan manajemen usaha dalam memperkenalkan produk-produk anggota ke masyarakat luas.

Saat ini, bantuan pemasaran yang dilakukan Pertakina dengan mengikutkan produk para anggota melewati pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan mengikutkan dalam acara pameran diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui produk dari anggota Pertakina.

Bantuan pemasaran produk Pertakina saat ini sudah mencapai tingkat nasional maupun internasional. Dalam tingkat nasional, pemasaran produk Pertakina sudah beredar di kota-kota besar diantaranya surabaya, jogjakarta, jakarta yang disalurkan ke toko khas oleh-oleh. Dan di tingkat internasional, produk pertakina sudah terjual di negara luar seperti Hongkong, Malaysia, Singapura, Taiwan yang diproduksi oleh anggota Pertakina yang berwirausaha di negara tersebut.

Kegiatan bantuan tersebut memberikan hasil positif terhadap upaya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggota maupun purna TKI yang berada di Kabupaten Blitar. Menurut

Sulistianingsih selaku ketua gerakan “*Visi misi kita saat ini mulai tumbuh dengan semakin baiknya perkembangan usaha yang dimiliki oleh anggota serta bantuan-bantuan dari Pertakina juga dapat meringankan beban permasalahan yang sedang dihadapi*”⁹

Dalam konteks kesejahteraan sosial merupakan rasa tenang masyarakat karena terpenuhinya hajat hidup lahir dan batin.¹⁰ Jika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak serta mampu mengembangkan diri untuk mengembangkan fungsi sosialnya.

Dampak dari bantuan Pertakina saat ini mulai dirasakan dengan semakin sedikitnya anggota yang kembali lagi bekerja ke luar negeri.

Kegiatan-kegiatan bantuan tersebut yang dilakukan Pertakina untuk memacu usaha di dalam negeri membuat para anggota Pertakina sudah merasa tercukupi untuk menghasilkan sumber nafkah bagi kehidupan sehari-hari. Menurut Ifa Harisma salah satu anggota dari organisasi Pertakina menuturkan “*Saat ini kondisi kesejahteraan kami mulai meningkat secara signifikan, Karena kami dapat menghasilkan nafkah di negeri sendiri lewat usaha yang kami bangun serta tidak jauh dari keluarga*”. Dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak yang diterima oleh anggota Pertakina menunjukkan adanya peningkatan

⁹ Dokumen wawancara penulis. 2017

¹⁰ loc cit.

kesejahteraan. Seperti yang diuraikan dalam Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 2009 yang menjadi dasar rakyat sejahtera adalah didapatkannya kebutuhan meteril berupa nafkah dan kebutuhan spiritual dalam segi hakikat batinnya tidak mengalami kekangan. Dan kemudian sebagai warga negara Indonesia menemukan kesejahteraan sosial di dalam negeri.

5.1.1 Peran Aktor Organisasi Pertakina dalam Memperluas Pengaruh Jaringan Melalui Pendekatan Peluang Politik

Kesuksesan sebuah gerakan sosial dalam masyarakat madani tidak terlepas dari adanya aktor yang memobilisasi sumberdaya dalam mempengaruhi keberhasilan. Dalam teori mobilisasi sumberdaya aspek diskontinuitas dan kontinuitas merupakan manajemen sumberdaya, dinamika organisasi, proses politik, strategi dan jejaring sosial. Sementara itu ada empat faktor mempengaruhi proses mobilisasi yaitu organisasi, kepemimpinan, peluang politik dan sifat alamiah lembaga politik.¹¹

Pendekatan peluang politik ini menurut Mc Charty tidak memfokuskan dalam kehidupan internal organisasi saja, tetapi perhatiannya sudah sistematis pada lingkungan politik dan institusi.¹² Peluang tersebut didapat ketika para aktor-aktor gerakan dapat memiliki akses dalam lembaga poitik dan memperkuat gerakan sosial karena memiliki akses serta

¹¹ loc cit.

¹² Loc cit

peluang untuk memanfaatkan sumber daya eksternal dalam mewujudkan keinginan aktor.

Begitu pula dengan organisasi Pertakina Kabupaten Blitar yang berusaha memperluas jaringan untuk mencapai tujuan. Aktor inilah yang berpengaruh dalam kegiatan bantuan dan pelayanan purna TKI Kabupaten Blitar dan menjadi penggerak awal inisiator dalam gerakan solidaritas swakelola organisasi Pertakina Kabupaten Blitar.

Dalam memperluas jaringan, aktor ketua Pertakina Sulistianingsih dan Sucipto sebagai *patner* menggandeng banyak pihak dalam memuluskan jalan membangun gerakan yang diciptakannya. Perluasan jaringan ini adalah cara untuk mempengaruhi kebijakan lembaga politik dan institusi dan menarik perhatian purna TKI untuk bergabung dalam.

Banyak sekali cara dalam memperluas jaringan gerakan swakelola pertakina ini. Dimana pengurus dari Pertakina semakin gencar mengenalkan fungsi dan tujuan organisasi Pertakina untuk menyelesaikan dan mengurangi permasalahan yang di alami oleh anggota dan purna TKI lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan menyebarkan potensi-potensi usaha dan memperkuat isu-isu strategis lewat permasalahan yang terkait solidaritas rasa persaudaraan dan senasib yang di alami oleh para TKI.

Tanggapnya gerakan Pertakina dalam menyelesaikan bantuan yang diminta oleh anggota dan TKI juga menjadi pendorong semakin tumbuh dan berpengaruh di masyarakat Kabupaten Blitar khususnya di kalangan purna

TKI. Seringnya masukan dan aduan-aduan yang diterima oleh organisasi Pertakina terkait permasalahan yang di alami oleh para anggota dan TKI menjadi salah satu bukti kepercayaan kinerja dan peran Pertakina dalam membantu menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu, banyak dari purna TKI di Kabupaten Blitar yang ikut dalam gerakan Pertakina untuk merubah nasib ketika para TKI tersebut sudah tidak lagi bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Hal tersebut tidak lain adalah dari usaha dan peran aktor kepemimpinan dari organisasi Pertakina yang mampu membangun kepercayaan melewati ide dan gagasan dalam membangun gerakan.

Gambar 5.2 Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 2017

Pertakina saat ini menjalin hubungan dengan pihak-pihak dari pemerintah maupun non-pemerintah dalam membangun jaringan. Hal tersebut dilakukan agar organisasi Pertakina dapat mempelajari dan menambah wawasan tentang pengembangan produktivitas pengenalan isu-

isu perbaikan kesejahteraan TKI di Kabupaten Blitar. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari mobilisasi sosial yang salah satunya yaitu dapat memanfaatkan jaringan sosial.

Pengenalan isu-isu penting tentang gerakan Pertakina saat ini lebih cenderung dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitasi para anggota dan TKI di Kabupaten Blitar. Pertakina selalu mencoba untuk meningkatkan kehadirannya dimasyarakat dengan memberikan pengaruh yang bertujuan mendidik dan sekaligus memberdayakan. Pertakina saat ini juga telah menjalin kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Blitar serta lembaga LP3 TKI dalam membantu pemasaran produk-produk anggota Pertakina.

Selain menjalin kerja sama dengan pemerintah, Pertakina juga menggandeng lembaga dan instansi lainnya dalam urusan memperluas isu-isu strategis dengan menggunakan media sosial. Dalam mobilisasi sumberdaya, penggunaan jejaring sosial seperti media sangat penting sekali dalam meningkatkan isu-isu serta dapat mengenalkan Pertakina ke masyarakat luas di Indonesia. Karena dengan semakin dikenalnya Pertakina secara otomatis dapat menumbuhkan gerakan sosial yang semakin kuat dan dapat bertahan ditengah pergantian isu-isu yang terjadi di masyarakat luas.

Gambar 5.3 Kerjasama Pertakina dengan Media



Sumber: <http://ideopedia.co.id/2017/07/06/gerakan-berdikari-pahlawan-devisa/>

Gambar diatas merupakan salah satu kerjasama Pertakina dengan media dalam mewujudkan semangat solidaritas antara para TKI agar lebih berdaya saing dengan berwirausaha di negeri sendiri. Karena dalam usaha menumbuhkan semangat kepada para purna TKI sangatlah sulit, hal tersebut dikarenakan SDM yang rendah dan menjadikan kurangnya pengetahuan dari proses dampak yang ditimbulkan ketika mereka telah berwirausaha.

Dengan kekurangan itulah, Pertakina menjadikan faktor pendorong untuk membantu para anggota dan TKI lainnya agar dapat terbimbing dan berdaya saing di negeri sendiri serta dapat memahami dan mengimbangi kebijakan pemerintah pusat tentang ekonomi bebas asean sebagai bentuk tantangan yang harus di taklukan oleh para anggota Pertakina.

5.1.2 Proses Penciptaan Aktivitas Organisasi Pertakina Dalam Memajukan Kesejahteraan Anggota

Proses penciptaan aktivitas organisasi Pertakina dalam memajukan anggota sangat penting sekali untuk mewujudkan kesejahteraan. Penciptaan aktivitas ini dilakukan dengan cara yang dinamis tergantung dengan kebutuhan yang dihadapi Pertakina dalam upayanya membantu anggota dan purna TKI lainnya yang berada di Kabupaten Blitar. Proses Penciptaan aktivitas ini erat kaitannya dengan proses pemberian penambahan pengetahuan tentang pentingnya berwirausaha di negeri sendiri.

Dalam penciptaan aktivitas sebuah gerakan sosial sangat perlu sekali adanya pemberdayaan. Konsep menurut Friedman pemberdayaan menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, melalui partisipasi pembelajaran sosial serta pengamatan langsung.¹³ Pemberdayaan sangat penting dalam membangun sebuah komunitas.

Penting sekali memahami bentuk penciptaan aktivitas yang dilakukan oleh Pertakina di Kabupaten Blitar. Pertakina selalu memberikan terobosan dari persoalan-persoalan yang di alami oleh anggota dan purna TKI lainnya di Kabupaten Blitar dengan cara rasa kekerabatan dan kekeluargaan yang sangat erat sekali.

¹³ op. cit.

Dari banyaknya kasus persoalan yang dialami oleh para anggota dan TKI lainnya di Kabupaten Blitar seperti persoalan kemiskinan, permasalahan sosial, gejala sosial, serta banyaknya kerusakan rumah tangga yang dialami oleh para TKI menandakan pemerintah kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan purna TKI di Kabupaten Blitar. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah sendiri tidak dapat memacu individu-individu masyarakat untuk merubah keadaan hidupnya ke arah yang lebih baik.

Dari permasalahan-permasalahan itulah timbul keresahan pada diri TKI. Keresahan tersebut akibatnya akan menimbulkan sebuah gejala aksi yang terpaksa harus dilakukan. Sebagai sebuah gerakan pembaruan dalam masyarakat madani, organisasi Pertakina mulai merancang sebuah gerakan dan aktivitas yang mendorong para anggota dan TKI lainnya untuk memperbaiki dan mengolah potensi yang ada disekitar mereka.

Tujuan dari memperbaiki dan mengolah potensi yang ada disekitar mereka adalah sebagai wujud pembangunan ketahanan ekonomi dan sekaligus berdampak pada ketahanan keluarga. Aktivitas yang dilakukan organisasi Pertakina adalah sebagai penyedia bantuan terpadu bagi para anggota serta purna TKI yang ada di Kabupaten Blitar. Aktivitas tersebut meliputi pemberdayaan, fasilitasi, dan pengendalian secara teratur untuk menjaga usaha yang di lakukan oleh anggota dapat berkembang dan menjadi salah satu penyumbang penghasilan ekonomi tanpa perlu kembali

bekerja di luar negeri. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Pertakina yang pertama adalah aktivitas pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan langkah awal dalam memajukan dan membangun potensi individu untuk peningkatan SDM. Langkah tersebut juga banyak sekali dilakukan oleh organisasi maupun pemerintah, akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi Pertakina berbeda dengan organisasi lainnya karena tingkat kesulitan dan cara pemberdayaan yang berbeda.

Pertakina dalam menjalankan gerakan swakelola tentu tidak mudah. Hal tersebut terjadi karena yang ditarik untuk ikut ke dalam gerakan swakelola ini adalah purna TKI yang kebanyakan memiliki ego yang sangat tinggi ketika pulang bekerja dari luar negeri. Banyak kasus yang mendorong para TKI ini pergi adalah sentimen negatif terhadap dirinya oleh orang lain yang mengakibatkan kebencian untuk memamerkan apa yang dimilikinya setelah mereka pulang dari luar negeri.

Oleh sebab itu, sangat berbeda sekali penanganannya dibandingkan dengan pemberdayaan yang dilakukan untuk individu lainnya. Pemberdayaan ini dimulai dengan penyuluhan yang dilakukan secara bersamaan serta *face to face*. Penyuluhan ini adalah sebagai cara menyakinkan sekaligus merubah sikap serta pemikiran individu TKI agar berfikir lebih maju untuk membangun dan mengolah potensi diri dan potensi yang ada di lingkungannya. Setelah penyuluhan tersebut berhasil barulah para purna TKI ini diikutkan dalam aktivitas pemberdayaan lainnya seperti pelatihan-

pelatihan dalam berwirausaha. Pelatihan-pelatihan tersebut seperti bagaimana mengolah produk dari bahan mentah sampai produk jadi. Kebanyakan jenis usaha yang ditekuni oleh para purna TKI ini adalah jenis makanan dan minuman ringan seperti kripik, minuman sari nanas dan lain sebagainya. Selain dari produk makanan dan minuman ringan, organisasi Pertakina juga memberikan pemberdayaan kepada TKI yang berlatarbelakang di bidang pertanian dan juga peternakan.

Jadi inti dari aktivitas jenis usaha pemberdayaan yang dilakukan tidak tertuju atas pilihan pihak Pertakina, akan tetapi, cenderung pada potensi individu anggotanya. Hal tersebut adalah sebagai wujud penciptaan ketahanan ekonomi pada individu anggota untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pertakina tidak memaksakan anggotanya untuk berwirausaha terhadap jenis usaha tertentu, akan tetapi Pertakina justru memfasilitasi segala jenis usaha yang akan ditekuni oleh anggotanya.

Kedua adalah aktivitas fasilitasi. Aktivitas fasilitasi ini merupakan usaha organisasi Pertakina dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan unit bantuan yang ditujukan kepada anggota dan TKI yang berada di Kabupaten Blitar. Berbeda dengan aktivitas pemberdayaan yang di khususkan untuk anggota organisasi Pertakina, Fasilitasi ini adalah sebuah bentuk kepedulian bersama terhadap rasa senasib dan sepenanggungan antara sesama TKI.

Aktivitas fasilitasi ini seperti bantuan terhadap para pelaku usaha anggota untuk mendapatkan kebutuhan dalam hal pemasaran. Kebanyakan bantuan tersebut adalah fasilitasi untuk mendapatkan surat dari dinas kesehatan untuk produk-produknya serta kebutuhan permodalan. Yang membedakan lagi adalah dari bentuk fasilitasi bantuan hukum dan ketahanan keluarga.

Bantuan hukum ini adalah berbentuk advokasi terhadap permasalahan yang dialami oleh anggota maupun TKI yang berada di Kabupaten Blitar. Banyak sekali permasalahan yang di alami oleh para TKI ini seperti kasus anaknya yang mengalami kasus hukum hingga penipuan yang kerap di alami oleh TKI yang berada di Kabupaten Blitar. Karena tidak jarang TKI mengalami gangguan jiwa karena uang yang didapat selama tahunan bekerja di luar negeri hilang karena penipuan yang di alaminya.

Untuk fasilitasi ketahanan keluarga ini ada karena banyaknya permasalahan keluarga yang berakibat perceraian serta terjadi penelantaran anak. Ketahanan keluarga sangat penting sekali dalam menunjang keharmonisan untuk menghindari pertikaian. Banyak kasus perceraian yang dialami oleh TKI karena ketidakcocokkan setelah mereka berpisah untuk bekerja di luar negeri yang diakibatkan oleh kasus perselingkuhan.

Ketahanan keluarga kerap menjadi ancaman dalam fikiran para TKI terutama individu yang memiliki pengetahuan yang kurang.

Banyaknya kasus perceraian yang dialami oleh TKI ini juga berdampak kepada anak-anaknya. Tidak jarang anak-anak mereka tidak tercontrol dan terlantar yang dapat mempengaruhi psikis bagi masa depannya. Dalam menghadapi persoalan tersebut Pertakina selalu mengajak negosiasi dan penyuluhan agar tercipta keharmonisan keluarga untuk mengurangi kasus perceraian.

Ketiga aktivitas pengendalian, aktivitas ini dimaksudkan untuk mempelajari permasalahan anggota Pertakina dalam menjalankan usahanya. Pengendalian ini adalah bentuk tanggungjawab untuk selalu memberikan pengarahan dan bantuan dalam menunjang keberhasilan anggota Pertakina untuk mencapai kesejahteraan.

Pengendalian ini dilakukan dengan mengamati setiap perkembangan usaha yang ditekuni oleh anggota Pertakina Kabupaten Blitar. Biasanya permasalahan yang muncul dari anggota Pertakina adalah masalah manajemen keuangan produksi yang selalu menjadi penghambat dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan manajemen tersebut adalah berada pada pengalokasian modal yang seringkali dicampurkan ke dalam uang pribadi. Dampaknya sangat signifikan sekali untuk kelanjutan modal produksi, banyak yang rugi karena uang usaha yang seharusnya di alokasiakan untuk modal produksi justru dipakai untuk keperluan pribadi yang tidak ada sangkutpautnya dengan usaha.

Dengan pengendalian diharapkan semangat usaha para anggota juga semakin tertanam karena merasa terus diperhatikan. Sampai saat ini pelayanan pengendalian dapat didapat lewat informasi aduan kepada pihak pengurus dan juga mengadakan kunjungan serta mengajak anggota untuk ikut penyuluhan dan studi banding ke beberapa lokasi yang dapat memberikan pengetahuan yang baru.

Aktivitas pengendalian ini tidak dipungut biaya. Dengan persamaan senasib dan seperjuangan Pertakina menginginkan kesuksesan bersama agar tercipta purna TKI yang sukses dan sejahtera untuk mengangkat ekonomi keluarganya dan masyarakat di Kabupaetn Blitar. Karena dengan semakin berkembang usahanya maka juga akan menambah nilai produksi, sehingga secara otomatis pasti menghasilkan lowongan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blitar.

Dari penciptaan aktivitas tersebut, yang memiliki tingkat keberhasilan adalah di sektor pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi Pertakina dianggap berhasil karena memiliki pencapaian dan dapat memperbaiki tingkat status sosial anggota organisasi Pertakina menjadi berdaya. Sulistiyani menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹⁴ Kemudian untuk aktivitas fasilitasi dan pengendalian sejauh ini hanya untuk menyeimbangkan adanya aktivitas pemberdayaan. Karena dalam melakukan aktivitas fasilitasi dan pengendalian memerlukan dana yang tidak kecil bagi organisasi yang berasal dari bawah yang mengutamakan kesadaran kolektif yang didorong dan diciptakan dari proses pembingkaiannya oleh para aktor gerakan.

5.2 Organisasi Pertakina dijadikan Model Gerakan Pemberdayaan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

Dalam gerakan sosial pasti ada siklus kemunculan suatu gerakan. Blumer, Mauus dan Tilly menjelaskan bahwa gerakan sosial tumbuh dan mengalami 4 siklus.¹⁵ Pertama, gerakan sosial ada yang memenuhi target dan berhasil kemudian diadopsi menjadi model gerakan. Kedua, gerakan sosial terkooptasi oleh lembaga negara, kemudian ketiga mengalami tekanan politik budaya, ekonomi dan keempat sengaja dijadikan alat barter oleh pendiri pengurusnya untuk kepentingan pragmatisme.

Sebagai kelompok organisasi yang menginginkan perubahan dalam memperoleh kesejahteraan anggota Pertakina, banyak yang sudah dilaksanakan. Berbagai kepentingan bersama yang dijalani untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan sosial yang ada di daerah

¹⁴ Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kesi Widjajanti. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm.17

¹⁵ Ibid

Kabupaten Blitar. Pertakina secara aktif terus mendorong pemerintah Kabupaten Blitar untuk selalu memperhatikan nasib para TKI yang pulang dari luar negeri. Akan tetapi kurangnya perhatian pemerintah terhadap para purna TKI ternyata menimbulkan sesuatu yang berbeda. Yang menarik dari gerakan Pertakina adalah perubahan target pendesakan dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka dengan melakukan pendekatan peluang politik terhadap tokoh ataupun pejabat yang berpengaruh di Kabupaten Blitar. Misalnya adalah ketika ada persoalan-persoalan yang dialami oleh anggota maupun TKI lainnya dengan mendorong perubahan atau melakukan advokasi kasus-kasus tertentu yang selalu menekankan untuk mempengaruhi kebijakan daerah dengan menggandeng peran tokoh yang memiliki akses untuk membuat regulasi kebijakan seperti anggota dewan dan tokoh masyarakat yang memiliki posisi pengaruh strategis dalam tatanan pemerintahan. Peran aktor disini adalah ketua dan pengurus organisasi Pertakina yang mencari peluang akses dalam mempengaruhi kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan kepentingan gerakan Pertakina.

Hadirnya Pertakina adalah sebuah keniscayaan bagi para purna TKI yang berada di Kabupaten Blitar. Dengan gerakan yang dilakukan secara kolektif ini memang didesain untuk melakukan pemberian contoh kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam melakukan bantuan-bantuan pelayanan masyarakat yang baik untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang

semakin meningkat. Karena perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Blitar tidak mampu untuk menampung keseluruhan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di bidang IKM dan UMKM dikarenakan minimnya dana dan kemampuan pegawai.

Pemerintah Kabupaten Blitar melewati Dinas Perindag saat ini hanya mampu untuk menampung kegiatan pemberdayaan dan kegiatan pembangunan ekonomi kreatif lainnya sebanyak 255 IKM dan UMKM.¹⁶

Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha dididang tersebut yang mencapai angka 20.000 ribu unit di tahun 2016. Dan saat ini Bupati Blitar menginginkan di akhir masa jabatannya agar masyarakat Kabupaten Blitar yang berwirausaha di bidang IKM dan UMKM setidaknya naik 25% dari total tahun sebelumnya. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Blitar melakukan adopsi terhadap kegiatan yang sangat positif dan produktif yang dilakukan oleh Pertakina untuk dijadikan bahan model gerakan yang meminimalkan anggaran dalam menciptakan usahawan baru.

Dengan semakin kuatnya keberadaan organisasi Pertakina di mata pemerintah daerah, saat ini Pertakina melakukan desakan-desakan untuk melakukan negoisasi yang ditujukan untuk kepentingan perkembangan produk daerah. Mc Charty menjelaskan dengan akses peluang politik dapat menentukan kapan sebuah gerakan sosial dapat memiliki akses untuk dapat

¹⁶ Data wawancara Dinas Perindag Kabupaten Blitar 2017

memiliki kesempatan kemajuan dalam gerakannya.¹⁷ Misalnya adalah saat ini Pertakina mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan produk lokal khususnya dari Pertakina agar dimasukkan ke dalam mini market yang beredar luas di Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilakukan agar produk-produk dari purna TKI dapat dikenal masyarakat luas dan sebagai awal kebangkitan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar. Saat ini Pertakina cemas dengan adanya plagiasi produk yang dilakukan oleh mini market, menurut Sucipto selaku pengurus Pertakina menuturkan *“karena tidak jarang produk makanan minuman yang di produksi oleh anggota Pertakina terplagiasi oleh perusahaan lain dengan label yang berbeda”*.¹⁸ Hal tersebut dapat merusak produk anggota organisasi Pertakina dipasaran.

Pemerintah didorong untuk melihat dan memahami kondisi tersebut.

Jika tidak ada respon yang baik akan kasus tersebut maka dipastikan produk masyarakat lokal akan terlibas oleh produk-produk yang di labeli oleh mini market. Hal tersebut menimbulkan kecemasan yang hebat di benak anggota TKI yang berwirausaha dalam taraf yang masih kecil. Oleh sebab itu saat ini Pertakina lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan memohon kepada pemerintah daerah agar produk-produk lokal masyarakat khususnya produk dari anggota Pertakina dapat diberikan kuota untuk dijual di mini market yang tersebar di Kabupaten Blitar. Dampak dari kebijakan tersebut juga

¹⁷ op. cit.

¹⁸ Dokumen wawancara peneliti 2017

akan menjadi tonggak awal kemandirian dan pertumbuhan ekonomi sosial di Kabupaten Blitar.

Pertakina saat ini menjadi *tranding topic* dikalangan internal pemerintah Kabupaten Blitar karena gagasan dan aktivitas gerakan yang menimbulkan dampak yang positif bagi purna TKI di Kabupaten Blitar.

Gerakan dan model swakelola menjadi literatur dan di adopsi oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik yang berbasis pemberdayaan. Khususnya adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar.

Pengadopsian gerakan ini memang didasari dari kurangnya anggaran pemerintah Kabupaten Blitar yang harus melayani IKM yang jumlahnya sangat besar. Menurut data dari Dinas Perindag Kupaten Blitar, saat ini ada 20000 lebih unit IKM dan UMKM yang berada di Kabupaten Blitar.¹⁹ Dengan adanya gerakan swakelola dari organisasi Pertakina yang mayoritas dana modal dari milik pribadi menjadi acuan pemerintah untuk mengetahui cara penumbuhan jiwa wirausaha.

Oleh sebab itu, pemerintah mengadopsi cara gerakan Pertakina dalam menghimpun dan melakukan pemberdayaan karena keberhasilannya mencapai target seperti yang diungkapkan oleh Mauus dan Tilly.

Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri saat ini mengadopsi dan menerapkan melalui kebijakan kinerja pelayanan di dinas-dinas yang terkait

¹⁹ Data dari Dinas Perindag Kabupaten Blitar 2017

pembangunan UKM dan IKM seperti Perindag dan Dinkop dan UMKM Kabupaten Blitar. Kebijakan Pelayanan tersebut seperti pemberdayaan yang bersifat penyuluhan intensif dan pengendalian yang bertanggungjawab. Banyak dari pelaku usaha IKM dan UMKM di Kabupaten Blitar tidak dapat bertahan lama karena kurangnya kinerja pelayanan yang hanya memberikan perhatian di awal saja, padahal usaha kecil seperti IKM dan UMKM khususnya di Kabupaten Blitar sangat rentan sekali mengalami kerugian. Sehingga tidak banyak pelaku usaha yang mampu mandiri dalam berwirausaha.

Pertakina saat ini juga mendorong pemerintah daerah Kabupaten Blitar bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman yang modern seperti ini. Salah satu yang ditekankan Pertakina saat ini adalah bisnis yang berbasis lewat online. Penggunaan media online saat ini lebih digemari masyarakat banyak ketimbang bisnis cara lama. Dimana konsumen masyarakat dapat membeli lewat media sosial di internet dalam memilih produk. Oleh sebab itu, Pertakina sendiri mulai merancang pengembangan jual beli secara online lewat media sosial. Pertakina ingin menunjukkan ke pemerintah bahwa dalam berbisnis saat ini tidak harus datang ke toko dan dapat lebih mudah melewati alat online seperti media sosial.

Dengan melihat perkembangan masyarakat dan metode Pertakina saat ini, pemerintah melalui Dinkop dan UMKM Kabupaten Blitar mulai merancang anggaran yang akan ditetapkan tahun 2018 mendatang untuk

membuat website media online dalam membantu menjual belikan produk-produk IKM dari Kabupaten Blitar. Dimana rancangan tersebut adalah salah satunya membuat *outlet* terpadu di Dinkop dan UMKM Kabupaten Blitar untuk penyediaan barang-barang produk lokal.

5.2.1 Pembangunan Kampung Pertakina Sebagai Investasi Keberlangsungan Gerakan Organisasi

Pembangunan Kampung Pertakina yang didirikan di Dusun Tremas Desa

Kebun Duren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar saat mulai dibangun.

Kampung TKI ini adalah sebagai ikon organisasi Pertakina untuk memberikan eksistensi pada pemerintah dan masyarakat luas. Pembangunan tersebut adalah sebagai sarana Pertakina membangun kemandirian dan bukti bahwa gerakan swakelola yang dilakukan oleh anggota Pertakina mampu merubah citra TKI menjadi lebih baik.

Menurut Laode Ida gerakan sosial memiliki ciri ciri tersendiri antara lain yaitu ada upaya kolektif untuk melakukan perubahan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan dan diwadahi oleh organisasi yang melembaga.²⁰ Kemudian dalam gerakan tersebut memiliki gagasan alternatif dalam mencapai perubahan kondisi sosial masyarakat yang dilakukan dengan aktivitas terus-menerus dan didorong oleh identitas kolektif yang sama. Ciri-ciri tersebut adalah upaya untuk dapat mempertahankan gerakan sosial yang sedang dijalankan.

²⁰ Op. Cit

Organisasi Pertakina saat ini melakukan alternatif perubahan yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan gerakan dengan membangun kampung purna TKI. Dimana di dalam kampung tersebut mayoritas 85% adalah para TKI dan keluarga TKI yang bergabung dalam gerakan yang digagas oleh organisasi Pertakina. Di kampung pertakina tersebut saat ini terdapat sekolah paud khusus untuk anak TKI yang ditinggal oleh orangtuanya yang bekerja di luar negeri. Sekolah paud tersebut didirikan karena kemauan bersama antara anggota Pertakina dan masyarakat di sekitar tersebut untuk lebih memfokuskan terhadap masa depan anak TKI.

Menurut Sucipto selaku pengurus organisasi Pertakina, "*Banyak anak-anak TKI yang ditinggal bekerja ke luar negeri sehingga kasih perhatian khusus yang didapat anak tidak maksimal*".²¹ Sehingga, penanganan pendidikan usia dini anak TKI juga tidak sama dengan anak lainnya yang diperhatikan oleh orangtuanya langsung. Pengenalan tentang nilai-nilai untuk tetap menjaga jalinan anak dan orangtua sangat diutamakan, karena ketika anak-anak mereka ditinggal pada waktu kecil dan bertahun-tahun akan merubah psikologis anak terhadap orangtua.

Bahkan juga banyak anak-anak yang tidak mengenal orangtuanya ketika pulang ke tanah air. Hal pencegahan tersebut dapat dicegah oleh pendidik yang berlatarbelakang dari TKI juga. Secara tidak langsung

²¹ Hasil wawancara dari narasumber pengurus organisasi Pertakina Kabupaten Blitar 2017

dengan adanya kampung Pertakina juga membantu pendidikan anak-anak TKI. Pemerintah Kabupaten Blitar mengapresiasi kegiatan pembangunan tersebut dan akan menjadikan kampung Pertakina menjadi salah satu prioritas ikon wisata Kabupaten Blitar di wilayah barat.

Pembangunan kampung Pertakina nanti juga menjadi tempat edukasi pariwisata serta menjadi tempat berkaryanya anggota Pertakina dalam berwirausaha. Fasilitas pembangunan saat ini yang tersedia adalah outlite penjualan produk, koperasi, tempat latihan olahraga yang didirikan untuk fasilitas olahraga anak-anak TKI dan kedepannya akan dibuat gedung pusat perkumpulan bersama.

Program yang dilakukan tersebut sangat efektif dalam menjaga keberlangsungan gerakan organisasi Pertakina. Seperti disebutkan oleh Laode ida dalam ciri-ciri khusus sebuah gerakan sosial yang diwadahi oleh organisasi yang memiliki gagasan alternatif perubahan dan memiliki aktivitas yang terus-menerus serta dalam gerakannya memiliki persamaan identitas yang sama yaitu sebagai purna TKI.

5.3 Hambatan dan Penunjang Gerakan Organisasi Pertakina Kabupaten Blitar

Pertakina bermula dari sekelompok kecil dalam masyarakat kemudian menjadi sebuah organisasi yang semakin besar dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Oberschall dalam Locher (dalam Singh 2010:130), keberhasilan dan

kegagalan sebuah gerakan, tergantung atas seberapa banyak orang-orang yang tergabung ke dalam organisasi, bagaimana mengarahkan mereka, apa pengorbanan mereka.²²

Sebagai masyarakat yang mulai mengerti arti kebebasan dalam mengakses sumber daya dan potensi dirinya sebagai masyarakat sipil yang memiliki karakter perubahan, Pertakina menjadi mesin pendorong yang mengarahkan purna TKI untuk berkreasi dan inovatif dalam mencapai ketahanan ekonomi. Perjalanan Pertakina tidaklah mudah dalam mengakses potensi yang berada di lingkungannya. Akan tetapi dengan semangat kebersamaan untuk berwirausaha di negeri sendiri menjadi alasan penyemangat gerakan swakelola ini tetap dilakukan. Banyaknya permasalahan yang di alami oleh purna TKI di Kabupaten Blitar menjadi persoalan semua elemen masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut tidak jarang menyeret masyarakat lainnya terlibat dalam menanggung nasib TKI. Misal adalah kasus penampungan gelap yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Blitar yang mengakibatkan kerugian kepada calon TKI yang mengalami permasalahan hingga penipuan.

Permasalahan yang dialami oleh TKI yang mengadukan ke Pertakina tidak jarang menyeret permasalahan tersebut ke dalam internal organisasi. Akan tetapi, persoalan tersebut tidaklah menjadi akhir dari peran Pertakina

²² op. cit

dalam membantu TKI di Kabupaten Blitar. Akan tetapi menjadi penyemangat yang kuat untuk saling membantu antara TKI.

Organisasi swakelola Pertakina merupakan fasilitator ornop yang menjadi terobosan dalam mengelola potensi anggota untuk meraih kesejahteraan. Dalam membantu anggota dan TKI di Kabupaten Blitar, banyak sekali hambatan dan penunjang dalam memperbaiki kehidupan para purna TKI.

5.3.1 Hambatan

Seperti halnya gerakan organisasi masyarakat sipil lainnya, dalam menjalankan peranannya tidak semudah yang dibayangkan. Hambatan di setiap kali menjalankan peran pasti memiliki tingkat kesulitan masing-masing. menurut. Menurut Oberschall dalam Locher (dalam Singh 2010:130) keberhasilan dan kegagalan dalam gerakan sosial salah satunya adalah bagaimana organisasi tersebut mengarahkan mereka ke tujuan gerakan.²³

Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada gerakan swakelola organisasi Pertakina berasal dari beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain adalah dari sumber daya manusia, geografis. Faktor lemahnya sumberdaya manusia menjadi hambatan yang mendasar bagi kinerja peran organisai Pertakina. Hal tersebut terjadi karena latarbelakang pendidikan yang mengakibatkan mereka sulit diarahkan untuk bergabung.

²³ loc. cit

Rendahnya pengetahuan menjadikan purna TKI di Kabupaten Blitar sulit sekali diajak untuk ikut bergabung dalam gerakan swakelola yang berbasis usaha IKM dan UMKM. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi sulitnya purna TKI tersebut ikut bermandiri dengan usahanya. Antara lain adalah faktor takut usahanya tidak berkembang dan merugi, kemudian tidak adanya semangat berwirausaha dalam pribadi individu purna TKI. Faktor tersebut menjadikan organisasi Pertakina bekerja keras untuk menyakinkan bahwa mereka dapat hidup sejahtera dengan berwirausaha.

Kemudian faktor geografis Kabupaten Blitar yang sangat luas menjadi faktor hambatan. Hambatan geografis ini membuat Pertakina kesulitan untuk mengakses para purna TKI yang kebanyakan tersebar di daerah yang jauh dari pusat kota. Kemudian akibat dari kondisi tersebut juga tidak jarang anggota Pertakina jarang untuk berkumpul dalam kegiatan rutinitas pertemuan. Padahal rutinitas pertemuan tersebut dapat menambah wawasan dan arahan untuk anggota Pertakina dalam menjalankan usahanya. Sampai saat ini Pertakina memiliki gedung organisasi di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Akan tetapi dalam melaksanakan peranannya sering bertempat di rumah ketua Pertakina di Desa Sanan Dayu Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu, anggota yang rumahnya seperti di Kecamatan lain seperti daerah Blitar selatan akan menyita waktu yang lama.

5.3.2 Penunjang

Banyak sekali penunjang kegiatan gerakan swakelola Pertakina untuk memberikan pengetahuan pemberdayaan berwirausaha bagi anggotanya.

Metode pengorganisasian menjadi salah satu penunjang keberhasilan gerakan. Menurut Paulo Freire, metode pengorganisasian dilakukan agar dapat menginspirasi upaya penciptaan atau memunculkan gerakan sosial, yaitu dengan penciptaan atau memunculkan lingkaran penyadaran, mengadakan pendidikan penyadaran, dan aksi-aksi kultural. Penunjang tersebut menjadikan Pertakina sebagai motor penggerak kebangkitan purna TKI untuk meraih simpati sosial. Penunjang tersebut antara lain adalah memunculkan penyadaran untuk melakukan sebuah kegiatan berwirausaha, aksi-aksi kultural yang ditandai semangat kebersamaan antara Pertakina dengan anggota serta akses ke pihak-pihak yang dapat membantu Pertakina dalam menjalankan tugasnya seperti dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Selain hal di atas, faktor penunjang lainnya adalah kondisi sosial ekonomi purna TKI. Dimana kondisi sosial ekonomi TKI menjadi pendorong utama dalam gerakan ini. Giddens memberikan artian untuk gerakan sosial yaitu proses upaya untuk mengejar kepentingan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.²⁴

Banyaknya persoalan yang dialami oleh purna TKI yang berada di

²⁴ Suryani amin. *Gerakan sosial petani: studi mobilisasi dan perubahan sosial kasus paseduluran petani penggarap perkebunan tratak (P4T) Kabupaten Batang*. (Jakarta: Disertasi pada Fisip UI,2008, hlm 14-15.

Kabupaten menjadi pelecut motivasi bersama untuk merubah dan menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi. Dorongan tersebut menjadi penunjang organisasi Pertakina dalam menghimpun purna TKI di Blitar untuk mendapatkan ketahanan ekonomi tanpa harus kembali bekerja di luar negeri.



BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pertakina muncul dilatarbelakangi oleh banyak sekali permasalahan sosial yang meliputi kondisi ekonomi, keluarga hingga permasalahan yang didapat pada saat masa kerja maupun pasca kerja di luar negeri. Pertakina menjadi sangat penting sekali keberadaanya saat ini ditengah kondisi banyaknya TKI yang mengalami masalah. Gerakan yang dilakukan oleh Pertakina adalah dengan menggunakan pemberdayaan di bidang kegiatan ketahanan ekonomi, membangun koperasi, bantuan hukum advokasi, bantuan ketahanan keluarga serta bantuan dalam pemasaran produk dari hasil kegiatan usahanya

Peran dalam memperluas jaringan gerakan swakelola pertakina, menyebarkan potensi-potensi usaha dan memperkuat isu-isu strategis lewat permasalahan yang terkait solidaritas rasa persaudaraan dan senasib yang di alami oleh para TKI. Pertakina menjalin kerja sama dengan pemerintah dan menggandeng LSM dalam urusan memperluas isu-isu strategis dengan menggunakan media sosial

Kemudian penciptaan aktivitas organisasi Pertakina dalam memajukan anggota menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Aktivitas yang dilakukan organisasi Pertakina adalah sebagai penyedia bantuan terpadu bagi para anggota serta purna TKI yang ada di

Kabupaten Blitar. Aktivitas tersebut meliputi pemberdayaan, fasilitasi, dan pengendalian secara teratur untuk menjaga usaha yang dilakukan oleh anggota dapat berkembang dan menjadi salah satu penyumbang penghasilan ekonomi tanpa perlu kembali bekerja di luar negeri.

Pertakina secara aktif terus mendorong pemerintah Kabupaten Blitar untuk selalu memperhatikan nasib para TKI yang pulang dari luar negeri.

Walaupun Pertakina hadir dari akar rumput, Pertakina dapat mempengaruhi pemerintah dengan kegiatan-kegiatan yang positif dalam membantu kesejahteraan TKI. Sehingga pemerintah mengadopsi pola peran organisasi tersebut ke dalam kebijakan pelayanan program kinerja dinas di Kabupaten Blitar. Dalam membangun eksistensinya, Pertakina saat ini mulai membangun kampung Pertakina yang akan dijadikan pusat pembelajaran dan pariwisata sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keberadaan eksistensi isu-isu untuk selalu menghidupkan jalannya gerakan organisasi Pertakina.

Dalam menjalankan gerakan, Pertakina memiliki hambatan serta penunjang dalam mencapai tujuan. Faktor Hambatan tersebut antara lain adalah dari sumber daya manusia, geografis, modal. Faktor lemahnya sumber daya manusia menjadi hambatan yang mendasar bagi kinerja peran organisasi Pertakina. Kemudian faktor penunjang dari gerakan swakelola Pertakina ini adalah semangat juang berkreasi dalam berwirausaha untuk pencapaian kesejahteraan sosial tanpa harus bekerja di luar negeri.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan penulis untuk gerakan organisasi Pertakina dalam menjalankan peranannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial perlu memperhatikan aspek-aspek fungsi dan prediksi kedepan tentang tantangan keberadaan organisasi Pertakina. yaitu antara lain:

1. Mempertahankan isu-isu dan mengembangkan inovasi seperti kampung pertakina harus segera direalisasikan secara optimal sebagai alat ikon yang dapat menjadi identitas tersendiri yang bisa menarik antusiasme masyarakat luas. Dengan pengembangan seperti itu nantinya gerakan Pertakina bukan sekedar gerakan yang ada di bawah saja, akan tetapi dapat menjadi sebuah gerakan yang dapat memberikan daya gentar dalam mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
2. Pertakina saat ini perlu menjalin hubungan dengan pemerintahan desa di Kabupaten Blitar. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas jaringan dan menambah anggota dari purna TKI yang belum mengetahui gerakan Pertakina dengan menghimbau agar pemerintah desa dapat menganggarkan pembangunan di sektor IKM dan UMKM khusus purna TKI yang dapat menjalin kerjasama dengan BUMDES.
3. Dalam mengadakan acara pemberdayaan terhadap purna TKI sebaiknya dilakukan pada jadwal yang telah disesuaikan dan

dipersiapkan jauh hari. Hal tersebut bertujuan untuk mempersiapkan anggota organisasi Pertakina agar dapat ikut serta dalam pembinaan, mengingat kondisi geografi Kabupaten Blitar dan luas dan juga adanya penyempatan waktu bagi anggota di sela-sela aktivitasnya.

4. Dalam melaksanakan pelayanan dan bantuan, diharapkan tidak terpusat kepada ketua organisasi dan bendahara. Hal itu bertujuan untuk melatih dan memberikan pengalaman terhadap pengurus lainnya untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi pergerakan organisasi Pertakina.



Daftar Pustaka

Buku

A.Rosidi dan A Fajriani (2013). *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Public*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset)

David Marsh & Gerry Stoker (2012). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka

Friedman, John. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. (Blackwell Publishers, Cambridge, USA, 1992)

John W. Creswell (2008), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga Bandung : Pustaka Pelajar.

Kurniawan lutfhi J Dkk. (2012) *Negara , Civil Society dan Demokratisasi*.(Jakarta .Intrans Publishing,)

Koentjaraningrat (2012). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Djambangan. Jakarta. Longman.)

Lexy J. Moleong (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Maeswara Garda (2009). *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*. (Narasi: Yogyakarta).

Randy R dan Rian Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. (Penerbit: PT Elex Media Koputindo)

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1990)

Said D.A. (2002) *Fenomena Partai Keadilan*. (Jakart: Noura)

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugeng Pujileksono. (2015) *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Kelompok Intrans Publishing, Malang)

Suharsini Arikunto , (1992), *Prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Soekanto Soerjono,(2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Jurnal

(Huff & Johnson), dalam Rebecca Morrison V. V (2006). *The Impact Of Msw Education On Social Worker Empowerment And Commitment To Client Empowerment Through Social Justice Advocacy*. Volume.42, no.1. Jstore

Irawati (2012) “*jurnal studi pemerintahan: identitas kultural dan gerakan politik kerapatan adat kurai dalam representasi politik lokal*,” Volume 3 nomer 1: 65-92.

R Z Leirissa (2004) “*Jurnal Sejarah:Charless Tilly dan Studi Tentang Revolusi*,” Volume 6 nomer 1: 41

Citra Berlian Butsi, Dkk. *Jurnal Administrasi Publik Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tki (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)*(JAP), Vol. 1, No. 7, Hal. 1313-1322

Suryani Amin. *Gerakan sosial petani: studi mobilisasi dan perubahan sosial kasus paseduluran petani penggarap perkebunan tratak (P4T) Kabupaten Batang*. (Jakarta: Disertasi pada Fisip UI 2008)

Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kesi Widjajanti. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.

Website :

Sebulan, Blitar Kirim 297 TKI ke Luar Negeri, Diakses dari <http://www.jpnn.com/news/sebulan-blitar-kirim-297-tki-ke-luar-negeri> . Pada tanggal 17 maret 2017. pukul 09.30 Wib.

Pemberdayaan masyarakat. diakses dari [suniscome.50webs.com /data/download/005%20Konsepsi%20Pemberdayaan.pdf](http://suniscome.50webs.com/data/download/005%20Konsepsi%20Pemberdayaan.pdf). di unduh hari rabu pukul 18.20 Wib 2017

Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan lihat di <http://bpm.malangkab.go.id/>. Pada rabu 25 januari 2016 pukul 17.20 Wib.

Kesejahteraan Sosial lihat di <http://www.gurupendidikan.com/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/> g= diakses pada tanggal 26 januari 2017 pukul 15.30 wib.

Lihat di <http://pastiguna.com/teknik-analisis-data/> pada tanggal 18 maret 2017 pukul 13.20 Wib

Pertakina Kabupaten Blitar diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id> pada tanggal 7 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Dokumen Lain :

Hasil wawancara singkat dengan salah satu pengurus organisasi pertakina pada tanggal 10 maret 2017

Undang- undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Daftar Pustaka

Buku

A.Rosidi dan A Fajriani (2013). *Reinventing Government Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Public*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset)

David Marsh & Gerry Stoker (2012). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka

Friedman, John. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. (Blackwell Publishers, Cambridge, USA, 1992)

John W. Creswell (2008), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga Bandung : Pustaka Pelajar.

Kurniawan lutfhi J Dkk. (2012) *Negara , Civil Society dan Demokratisasi*.(Jakata .Intrans Publishing,)

Koentjaraningrat (2012). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Djambangan. Jakarta. Longman.)

Lexy J. Moleong (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Maeswara Garda (2009). *Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono*. (Narasi: Yogyakarta).

Randy R dan Rian Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. (Penerbit: PT Elex Media Koputindo)

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1990)

Said D.A. (2002) *Fenomena Partai Keadilan*. (Jakart: Noura)

Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugeng Pujileksono. (2015) *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Kelompok Intrans Publishing, Malang)

Suharsini Arikunto , (1992), *Prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Soekanto Soerjono,(2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Jurnal

(Huff & Johnson), dalam Rebecca Morrison V. V (2006). *The Impact Of Msw Education On Social Worker Empowerment And Commitment To Client Empowerment Through Social Justice Advocacy*.Volume.42, no.1. Jstore

Irawati (2012) “*jurnal studi pemerintahan: identitas kultural dan gerakan politik kerapatan adat kurai dalam representasi politik lokal*,” Volume 3 nomer 1: 65-92.

R Z Leirissa (2004) “*Jurnal Sejarah:Charless Tilly dan Studi Tentang Revolusi*,” Volume 6 nomer 1: 41

Citra Berlian Butsi, Dkk. *Jurnal Administrasi Publik Efektivitas Program Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tki (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya)*(JAP), Vol. 1, No. 7, Hal. 1313-1322

Suryani Amin. *Gerakan sosial petani: studi mobilisasi dan perubahan sosial kasus paseduluran petani penggarap perkebunan tratak (P4T) Kabupaten Batang*. (Jakarta: Disertasi pada Fisip UI 2008)

Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kesi Widjajanti. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.

Website :

Sebulan, Blitar Kirim 297 TKI ke Luar Negeri, Diakses dari <http://www.jpnn.com/news/sebulan-blitar-kirim-297-tki-ke-luar-negeri> . Pada tanggal 17 maret 2017. pukul 09.30 Wib.

Pemberdayaan masyarakat. diakases dari [suniscome.50webs.com /data/download/ 005%20Konsepsi% 20Pemberdayaan.pdf](http://suniscome.50webs.com/data/download/005%20Konsepsi%20Pemberdayaan.pdf). di unduh hari rabu pukul 18.20 Wib 2017

Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan lihat di <http://bpm.malangkab.go.id/>. Pada rabu 25 januari 2016 pukul 17.20 Wib.

Kesejahteraan Sosial lihat di <http://www.gurupendidikan.com/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/> g= diakses pada tanggal 26 januari 2017 pukul 15.30 wib.

Lihat di <http://pastiguna.com/teknik-analisis-data/> pada tanggal 18 maret 2017 pukul 13.20 Wib

Pertakina Kabupaten Blitar diakses dari <http://www.bnptki.go.id> pada tanggal 7 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

Dokumen Lain :

Hasil wawancara singkat dengan salah satu pengurus organisasi pertakina pada tanggal 10 maret 2017

Undang- undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial